



WiRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

"INDO DEFENCE 2018 EXPO & FORUM" MENINGKATKAN KEMAJUAN DAN KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI

MEWASPADA DAMPAK
TEKNOLOGI
DAN INOVASI DISRUPTIF
TERHADAP
ANCAMAN KEAMANAN
NASIONAL

BELA NEGARA DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS:
MINGINTEGRASIKAN KAPITAL
SOSIAL DALAM UPAYA
BELA NEGARA DI TINGKAT
KOMUNITAS

PENCAPAIAN PROGRAM
BELA NEGARA

SUDAH SIAPKAH KITA
MENGHADAPI BENCANA
ALAM?



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



Kemhan RI



Kemhanri



kemhan RI

ISBN 1693-0231



INDONESIA

SELAMAT
KEPADA
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
ATAS PENGANUGERAHAN
PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI
TERHADAP PENILAIAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OLEH
OMBUDSMAN RI



DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan
Marsdyo TNI Hadiyan Sumintaatmadja

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos.

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.
Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:

Puskom Publik Kemhan
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457



Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami menyapa para pembaca WIRA Edisi ke enam bulan November-Desember 2018. Tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan diantaranya: "Indo Defence 2018 Expo & Forum" Meningkatkan Kemajuan dan Kemampuan Industri Pertahanan Dalam Negeri; Mewaspadai Dampak Teknologi dan Inovasi Disruptif Terhadap Ancaman Keamanan Nasional; Bela Negara dalam Perspektif Sosiologis: Mengintegrasikan Kapital Sosial dalam Upaya Bela Negara di Tingkat Komunitas; Pencapaian Program Bela Negara; Sudah Siapkah kita Menghadapi Bencana Alam?; serta beberapa Berita Pertahanan dan Galeri Foto.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Tim Redaksi

Daftar Isi

ARTIKEL

6

INDO DEFENCE 2018 EXPO & FORUM" MENINGKATKAN KEMAJUAN DAN KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI

Indo Defence 2018 Expo & Forum merupakan ajang promosi bagi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional yang digelar dua tahun sekali sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan lokal dengan cara membangun kemitraan dengan pihak asing.



13

MEWASPADA DAMPAK TEKNOLOGI DAN INOVASI DISRUPTIF TERHADAP ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL



Ancaman pertahanan dan keamanan tidak selalu muncul dari senjata canggih atau alutsista *modern*. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi digital, munculnya teknologi dan inovasi baru yang bersifat disruptif, menjadi "game-changer" yang mengubah tatanan dan perilaku aktor keamanan global.

23

BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS: MENGINTEGRASIKAN KAPITAL SOSIAL DALAM UPAYA BELA NEGARA DI TINGKAT KOMUNITAS

Tiga pertanyaan dasar tentang bela negara, yakni: Apa yang harus dibela dari negara? Mengapa negara harus dibela? dan, Siapa yang harus membela negara?



29

PENCAPAIAN PROGRAM BELA NEGARA

Pembangunan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara merupakan pembentukan karakter bangsa di berbagai bidang kehidupan yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga Negara untuk cintai tanah air.

37

SUDAH SIAPKAH KITA MENGHADAPI BENCANA ALAM?

Pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebencanaan terutama gempa bumi sangatlah penting dimulai sejak dini, baik di rumah ataupun di sekolah.

BERITA PERTAHANAN

43 MENHAN RI : INDONESIA DALAM PROSES
JADI PRODUSEN ALUTSISTA DI KANCAH
INTERNASIONAL

44 MENHAN: INDO DEFENCE 2018 EXPO & FORUM
DIHARAPKAN PERLUAS PASAR BAGI PRODUK
INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI

45 MENHAN RI DAN MENHAN MALAYSIA SEPAKAT
PERLUNYA MOU KERJASAMA PERTAHANAN

46 KOMITE KERJA SAMA PERTAHANAN
GABUNGAN INDONESIA - ITALIA KEDUA 2018

47 KEMHAN MENERIMA ANUGERAH PREDIKAT
KEPATUHAN TINGGI TERHADAP PENILAIAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DARI
OMBUDSMAN RI

48 GALERI FOTO

“INDO DEFENCE 2018 EXPO & FORUM” MENINGKATKAN KEMAJUAN DAN KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI

Oleh:
Tim Redaksi



Indonesia kembali menorehkan sejarah dalam perhelatan pameran Industri Pertahanan berskala internasional terbesar di Asia Tenggara. Untuk kali kedelapannya di tahun 2018 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pameran internasional bidang teknologi industri pertahanan tiga matra, *Indo Defence 2018 Expo & Forum*. Pameran tersebut diselenggarakan bersamaan dengan pameran kedirgantaraan dan helikopter, *Indo Aerospace featuring Indo Helicopter*

2018 *Expo & Forum* serta pameran kamaritiman *Indo Marine 2018 Expo & Forum* pada tanggal 7 sampai dengan 10 November 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kali ini event yang menampilkan produk-produk industri pertahanan terbaru dari berbagai negara mengambil tema “*Building Global Defence Partnerships to Secure the Future*” dan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Turut menyaksikan acara pembukaan, beberapa Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan dan Anggota DPR RI dan

sejumlah pejabat dari Kementerian / Lembaga terkait.

Indo Defence 2018 Expo & Forum merupakan ajang promosi bagi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional yang digelar dua tahun sekali sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan lokal dengan cara membangun kemitraan dengan pihak asing. Penyelenggaraan *Indo Defence 2018 Expo & Forum* adalah bagian dari konsep diplomasi pertahanan Indonesia untuk meningkatkan

interdependensi demi mencapai perdamaian dan kemakmuran dunia. Disamping itu, ajang bergengsi ini dijadikan media komunikasi dan informasi yang efektif untuk menjalin kontak bisnis dan transfer teknologi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan industri pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Kegiatan pameran *Indo Defence 2018 Expo & Forum* tahun ini sangat berbeda dan mengalami kenaikan yang cukup pesat dari sisi luasan dan jumlah kehadiran negara peserta. *Indo Defence 2018 Expo & Forum* diikuti oleh 867 peserta pameran dari 60 negara. Selain itu 33 negara-negara sahabat secara resmi mengirimkan sekitar 193 *Official Delegation* untuk menyaksikan pameran. Negara-negara yang hadir tersebut diantaranya berasal dari Malaysia, Australia, Yunani, Jepang, Fiji, Belarus, Arab Saudi, Slovakia dan Uni Emirat Arab. Sedangkan dari sisi total luasan yang terpakai pada

tahun 2018 ini meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun 2016. Terdapat dua hall baru yaitu hall B3 dan hall C3 di JIExpo Kemayoran yang digunakan untuk *stand* peserta untuk mengakomodir target kepesertaan tahun ini.

Perusahaan asing yang ikut berperan menjadi peserta untuk memamerkan produknya antara lain *Rheinmetall*, *SAAB*, *Lockheed Martin*, *KAI*, *FN Herstal*, *Beretta*, *Excalibur*, *SVOS*, *Nexter*, *Reutech*, *Turkish Aerospace Industries, Inc.*, *dan Polish Armanent Group/PGZ* dan beberapa perusahaan lainnya.

Sejumlah perusahaan industri pertahanan dalam negeri baik milik pemerintah maupun swasta juga turut serta dalam pameran antara lain PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Len, PT Dahana, PT Sritex, Infoglobal, Bhimasena Group, PT Sentra Surya Ekajaya, PT Ridho Agung dan yang lainnya. Selain itu, ada pula dari instansi pemerintah,

perguruan tinggi dan media.

Kesempatan ajang pameran ini juga digunakan beberapa industri pertahanan dalam negeri untuk menampilkan *live demonstration* dari produk-produk pertahanan unggulannya. Salah satunya seperti PT Pindad yang menampilkan prototipe *Tank Medium* terbarunya "Harimau". Demikian juga PT Saba Wijaya, PT Sri Rejeki Isman, PT Sentra Surya Ekajaya (SSE), PT Cakra Tunggal Dharma, PT Sport Glove Indonesia, PT Promatra Nusantara (Rudy Project Indonesia), PT Motorola Solutions Indonesia dan PT Mandira Jaya Abadi (MJA Tech) serta didukung penuh oleh Peleton Intai & Tempur Kostrad untuk memberikan pemahaman mengenai keunggulan alat-alat pertahanan hasil produksi dalam negeri kepada seluruh pengunjung.

Selain pameran produk pertahanan, pada penyelenggaraan *Indo Defence 2018 Expo & Forum* juga diselenggarakan *forum* internasional



bertemakan "Ensuring Regional Stability through Cooperation on Counter Terrorism" dan Indo Marine 2018 forum yang bertemakan "Ensuring Regional Stability Through Development Of National Maritime Capability and Maritime Security Cooperation", juga Indo Aerospace Business Forum bertemakan "Sustainability of Civil Aviation in Indonesia".

Penyelenggaraan Indo Defence 2018 Expo & Forum didukung penuh oleh Kementerian/Lembaga pemerintah dan asosiasi terkait antara lain Kemendag, Kemenlu, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenristek dan Dikti, Kemenperin, Kemenhub, Kemenpar, KKP, TNI, Polri, Bakamla, BNPT, Universitas Hang Tuah, Unhan, ITB, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia dan Indonesia Aircraft Maintenance Services Association.

Tanggal 7 November sampai dengan 9 November 2018, pameran ini dikhkususkan untuk pengunjung bisnis dan profesional. Sedangkan pada hari terakhir, tanggal 10 November 2018, pameran dibuka untuk umum dengan *pre-registrasi online* atau dikenakan biaya masuk.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat membuka pameran industri pertahanan "Indo Defence 2018 Expo & Forum" berharap agar penyelenggaraan pameran ini bermafaat untuk meningkatkan kemajuan dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Menurut Wapres suatu upaya kemandirian bidang industri pertahanan dalam negeri merupakan hal penting dalam rangka mewujudkan kemandirian Alutsista untuk memenuhi kebutuhan kekuatan TNI.

Wapres RI lebih lanjut mengatakan,

sebagaimana pengalaman Indonesia terdahulu, Indonesia mempunyai pengalaman pada saat terkena sanksi embargo pada tahun 90-an, bagaimana sulitnya Indonesia memperoleh Alutsista karena adanya embargo itu. Karena itulah, maka Indonesia harus selalu siap mandiri atas kemampuannya sendiri, disamping menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.

Penyelenggaraan pameran Indo Defence 2018 diharapkan Wapres Jusuf Kalla akan bermafaat untuk memberikan pengetahuan sejauh mana kemajuan teknologi pada masa datang dan masa kini, serta mengetahui apa yang dibutuhkan pada dewasa ini. Kemampuan industri pertahanan dan riset pertahanan suatu negara juga banyak bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Sebagai contoh kemajuan di bidang internet yang berawal dari riset militer untuk





kemampuan militer yang kemudian menjadi suatu hal yang begitu berguna bagi semua orang pada dewasa ini. Begitu juga kontainer pada awalnya dimulai untuk kebutuhan perang, kemudian menjadi bagian penting dari kemajuan perdagangan di dunia ini.

Pada kesempatan pembukaan pameran *Indo Defence* 2018 Menhan RI, Ryamizard Ryacudu mengutarakan peran pameran ini yaitu membuka dan memperluas pasar bagi produk industri pertahanan Indonesia baik sebagai produk utuh maupun sebagai bagian dari mata rantai industri pertahanan global. Adapun sasaran strategisnya yaitu mempromosikan produk industri pertahanan nasional serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan dalam negeri Indonesia dengan industri pertahanan negara sahabat, yang pada gilirannya dapat menunjang terealisainya kemandirian industri pertahanan nasional Indonesia.

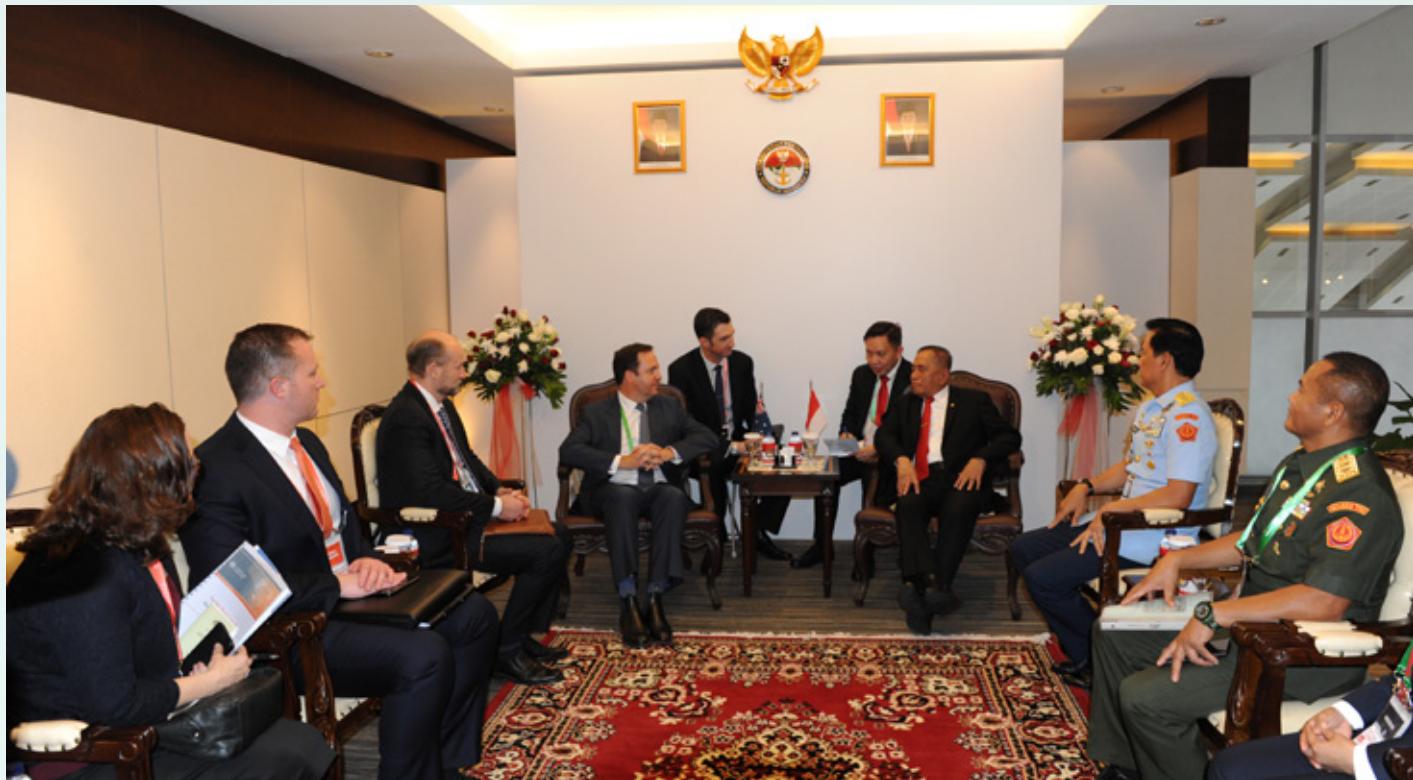
Menhan dengan bangga mengatakan bahwa salah satu bukti keberhasilan dari kemajuan industri pertahanan, dipamerkan salah satu produk baru industri pertahanan nasional yaitu *Medium Tank* produksi PT. Pindad yang bekerjasama dengan FNSS, Turki. *Medium Tank* ini adalah sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah terhadap produk anak Bangsa. Dengan terbuktinya Industri pertahanan yang mandiri dan maju di era saat ini, tentunya akan dapat membantu proses pertumbuhan dan kemandirian ekonomi dalam negeri yang sejalan dengan Visi Nawa Cita Presiden RI.

Menurut Menhan Ryamizard Ryacudu, Indonesia telah mampu untuk mandiri dan menuju proses untuk menjadi produsen alutsista yang mampu berkiprah di kancah internasional. Hal ini bukan suatu yang ambisius tetapi sebuah realita yang harus diwujudkan bersama, karena pada dasarnya bangsa

Indonesia telah ditakdirkan menjadi bangsa yang berpotensi besar untuk berinovasi dan mengembangkan industri yang berbasis teknologi canggih. Perkembangan teknologi masa kini yang begitu pesat dan sarat dengan nuansa kompetisi global antar bangsa, pada gilirannya memiliki arti penting dalam menentukan eksistensi suatu bangsa.

Kesepakatan MoU di Sela-Sela *Indo Defence* 2018 Expo & Forum

Kesempatan pameran *Indo Defence* 2018 *Expo & Forum* menjadi momentum yang baik bagi perusahaan industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan berbagai mitra strategis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penyelenggaraan *Indo Defence* 2018, beberapa *Memorandum of Understanding (MOU)* ditandatangani diantaranya, *MoU* Pindad dengan Rohde Schwarz (Jerman). Kerjasama



dua industri pertahanan ini untuk menjalin kerja sama di bidang perawatan dan perbaikan untuk *SDTR/M3TR* radio taktis *R&S*, *National Waveform Development* dan interoperabilitas, Implementasi kriptologi lokal untuk jaringan radio taktis serta untuk Integrasi *vehicular* radio taktis.

Antara PT. Pindad dengan industri *CMI Defence (CMID)*, juga telah tercapai penguatan kerja sama strategis untuk peningkatan kapabilitas Pindad sebagai mitra *CMID* dalam manufaktur sistem senjata *turret* dengan *training ahli* dan peningkatan kandungan lokal *supplier-supplier* di Indonesia dalam rangka menjadikan Pindad sebagai *supply HUB turret CMID* dan kerja sama memajukan potensi ekspor.

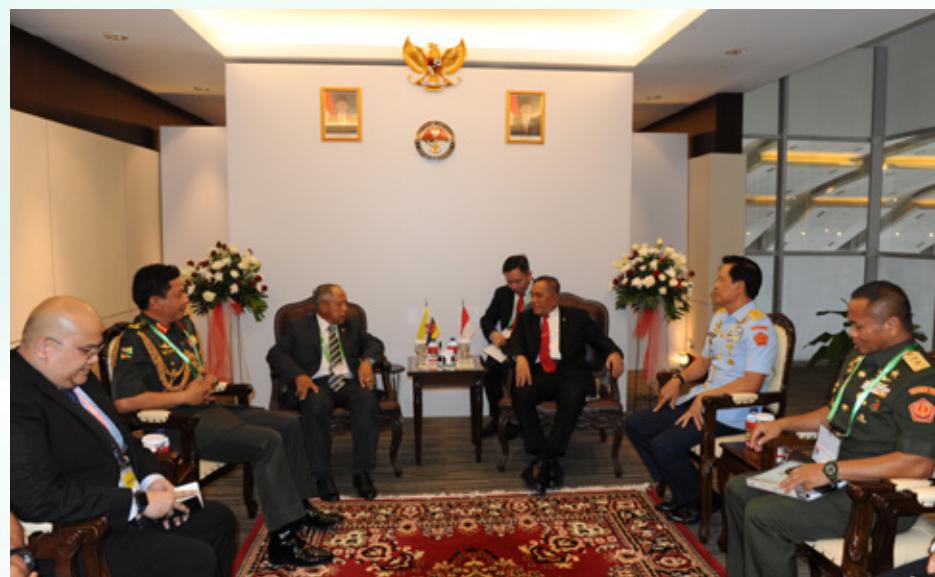
Sementara itu dengan industri Pertahanan Korea pemerintah Indonesia juga telah menyatakan kesepakatan untuk beberapa kerjasama. Kemhan RI melalui Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan melakukan penandatanganan

kontrak kerjasama dengan *Korea Aerospace Industries (KAI)*. Kontrak ini adalah tindak lanjut dari hubungan antara Kemhan RI, TNI AU dan KAI. Bagi Korea khususnya KAI, TNI AU merupakan *customer* yang sangat penting. Penandatanganan kontrak ini mendukung dan memperkuat alutsista TNI AU.

Kabarahan menyampaikan penghargaan kepada pihak Korea atas terselenggaranya penandatanganan

kontrak ini. Melalui kedua kontrak ini, Kabaranahan menyakini KAI akan mempersiapkan kemampuan terbaiknya untuk mendukung Kemhan dan TNI AU.

Tercapainya penandatanganan beberapa *MoU* ini, sejalan dengan tujuan dan harapan dari penyelenggaraan pameran sebagaimana yang disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yakni terwujudnya penguatan



kolaborasi industri pertahanan dalam negeri Indonesia dengan industri pertahanan negara sahabat yang pada gilirannya dapat menunjang terealisainya kemandirian industri pertahanan nasional Indonesia.

Pertemuan Pejabat Pertahanan Negara di Sela-Sela *Indo Defence 2018 Expo & Forum*.

Kegiatan pameran *Indo Defence 2018* juga diisi oleh sejumlah pertemuan dengan para pejabat pertahanan dari negara-negara sahabat untuk membahas potensi kerjasama di bidang pertahanan. Salah satunya adalah usai pembukaan, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu langsung menerima kunjungan *Senior Minister of State for Defence Singapore (SMS)* Heng Chee How. Pada pertemuan ini disampaikan Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan Singapura atas pernyataan bersama tentang melawan terorisme di ASEAN dengan *Our Eyes Initiative*, serta ancaman kimia, biologi dan radiologi. Menhan berharap hubungan kerja sama dan persahabatan kedua

negara dapat terus dipelihara dengan semangat persaudaraan serta prinsip saling menghormati, dan akan memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk keamanan, perdamaian di kawasan dan dunia pada umumnya.

Usai menerima kunjungan *Senior Minister of State for Defence Singapore*, Menhan RI menerima kunjungan Wakil Menhan Iran H.E. *Brigadier General Ghasem Taghizadeh*. Pada kesempatan pertemuan ini, Menhan mengatakan dalam kerja sama pertahanan, Indonesia berpedoman pada tiga pilar kebijakan yaitu, membangun saling percaya, membangun kapasitas pertahanan, serta mendorong kemandirian industri pertahanan RI.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsda TNI Hadiyan Sumitaatmadja, pada tanggal 8 November menerima kunjungan kehormatan Sekjen Kemhan Malaysia Mr Dato Halimi bin Abd. Usai

menemui Sekjen Kemhan Malaysia, Sekjen Kemhan Marsda TNI Hadiyan Sumitaatmadja juga menerima kunjungan Direktur Jenderal Ukroboronprom Ukraina Mr Pavlo Bukin beserta rombongan.

Dengan diadakannya forum pertemuan pejabat pertahanan negara pada *Indo Defence Expo & Forum* seperti ini diharapkan industri pertahanan dalam negeri dapat bertemu dan menjalin kerjasama dengan industri pertahanan negara lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan serta memberikan pilihan kepada pengguna industri pertahanan untuk memilih produk yang paling sesuai bagi kebutuhan mereka.

Penampilan *Live Demonstration*

Pameran *Indo Defence 2018 Expo & Forum* juga manampilkkan beberapa demonstrasi keunggulan dari alat pertahanan yang baru diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri (PT Pindad). Mulai dari *Medium Tank* yang diberi nama "Harimau",



kendaraan Tempur "Badak" dan alutsista lainnya buatan PT Pindad berlaga memperlihatkan kecanggihan teknologi disegala jenis medan yang dihadapi.

Kehadiran *Medium Tank* menjadi bukti kemampuan industri pertahanan dalam negeri menghasilkan produk inovatif berteknologi tinggi dalam mendukung kemandirian Alutsista. *Medium Tank* merupakan program panjang dalam membangun penguasaan teknologi menuju kemandirian alutsista dalam negeri. *Medium Tank* termasuk pada 7 program pengembangan strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan BUMNIS agar dapat bersaing dengan industri pertahanan luar negeri.

Disamping penampilan dari alutsista buatan PT Pindad, ada juga penampilan pasukan Peleton Intai Tempur (Tontaipur) Kostrad yang melaksanakan Demonstrasi langsung dalam *Operasi Search and Rescue*

(SAR) penyanderaan oleh sekelompok teroris. Tontaipur menyajikan simulasi penyelamatan penyanderaan dengan menggunakan alutsista buatan industri pertahanan dalam negeri seperti kendaraan angkut personel, kendaraan taktis serta senapan serbu buatan PT PINDAD dan alat komunikasi buatan PT LEN. Dalam *live demonstration* ini Tontaipur juga menyertakan satwa terlatih.

Indo Defence kali ini terlaksana dengan aman dan sukses. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak. Keberhasilan ini menjadi modal utama untuk mempersiapkan *Indo Defence* berikutnya 2 tahun mendatang.***



MEWASPADA DAMPAK TEKNOLOGI DAN INOVASI DISRUPTIF TERHADAP ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL

Oleh:
Darma Agung, M.Si (Han)

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia



“Victory will smile upon those who anticipate changes in the character of war, not upon those who wait to adapt themselves after changes occur.”

- Jenderal Giulio Douhet -

Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) menyebutkan ada 3 jenis ancaman yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman non militer, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun non negara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Disebutkan pula bahwa kemajuan iptek mempengaruhi bentuk dan pola perang dimasa yang akan datang. Pertahanan negara tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek teknologi. Dinamika teknologi dapat menentukan sebuah peperangan, maupun menjadi ancaman bagi keamanan negara. Untuk itu, merupakan sebuah keharusan bagi para pemangku kebijakan pertahanan untuk memperbarui informasi perkembangan teknologi terkini.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam keterangan pers

di Jakarta (1/8), mengingatkan seluruh pejabat tinggi TNI agar senantiasa mengikuti dan menyiapkan perkembangan dunia kemiliteran, khususnya terkait dengan teknologi, doktrin, penerapan, serta spektrum ancaman yang semakin kompleks. Panglima TNI menambahkan, dalam menghadapi tren ancaman baru, maka membutuhkan pola-pola operasi baru dan pola operasi baru membutuhkan doktrin-doktrin baru.

Ancaman pertahanan dan keamanan tidak selalu muncul dari senjata canggih atau alutsista modern. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi digital, munculnya teknologi dan inovasi baru yang bersifat disruptif, menjadi "game-

Teknologi/Inovasi Disruptif

Istilah teknologi disruptif diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower untuk menggambarkan teknologi baru atau inovasi yang membuat teknologi atau inovasi yang sudah mapan, menjadi usang hanya dalam beberapa tahun. Definisi lain dari teknologi disruptif adalah teknologi yang ketika diperkenalkan, dapat mengubah pasar, menciptakan pasar baru, atau menghancurkan pasar yang ada untuk teknologi lain.

John C. Keefe dalam artikelnya, mendefinisikan teknologi disruptif dalam konteks militer atau pertahanan keamanan, sebagai sebuah inovasi

keamanan internasional tidak lepas dari perkembangan teknologi. Teknologi/inovasi baru yang bersifat disruptif, dapat berkembang menjadi ancaman keamanan nasional. Ancaman keamanan dari berkembangnya teknologi-teknologi ini memunculkan dilema keamanan baru, menantang doktrin dan regulasi pertahanan, dan menuntut perubahan strategi pertahanan. Terry Pudas mengkategorikan ada 4 sifat tantangan keamanan dari munculnya teknologi disruptif, yaitu tradisional, tidak teratur (*irregular*), katastrofe, dan disruptif secara alamiah.

Dalam siklus teknologi baru, terdapat beberapa teknologi disruptif, seperti pada gambar berikut.



changer" yang mengubah tatanan dan perilaku aktor keamanan global, dan mengharuskan negara merespon ancaman tersebut dengan cara yang berbeda dari ancaman dan paradigma keamanan konvensional/tradisional.

yang memaksa kemajuan dalam keamanan mengatur keamanan saat ini terkait dengan perubahan faktor geopolitik, militer, ekonomi, dan sosial.

Sejarah peperangan dan

Keefe menyebutkan beberapa teknologi yang bersifat disruptif antara lain bioteknologi, nanoteknologi, dan teknologi informasi. World Economic Forum di tahun 2015 memprediksikan 8 jenis teknologi baru yang dapat

mengubah lanskap keamanan internasional, yaitu *drone*, senjata otonom, perangkat *wearable*, *additive manufacturing*, energi terbarukan, nano teknologi, senjata biologis, dan senjata bio-kimia.

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa teknologi/inovasi disruptif yang digunakan oleh publik baik komersil/non-komersil, dan dalam kondisi tertentu berpotensi memberikan ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional, seperti: Media Sosial, Mata Uang Virtual, Aplikasi Pesan Instan (Komunikasi Terenkripsi), *Drone/UAS*, Additive Manufacturing (3D printing), Artificial Intelligence, dan lain sebagainya.

a. Media Sosial

Konsep-konsep seperti 'non-konvensional', 'asimetris', 'tidak teratur/irregular', 'hibrida', atau 'perang generasi baru' sering

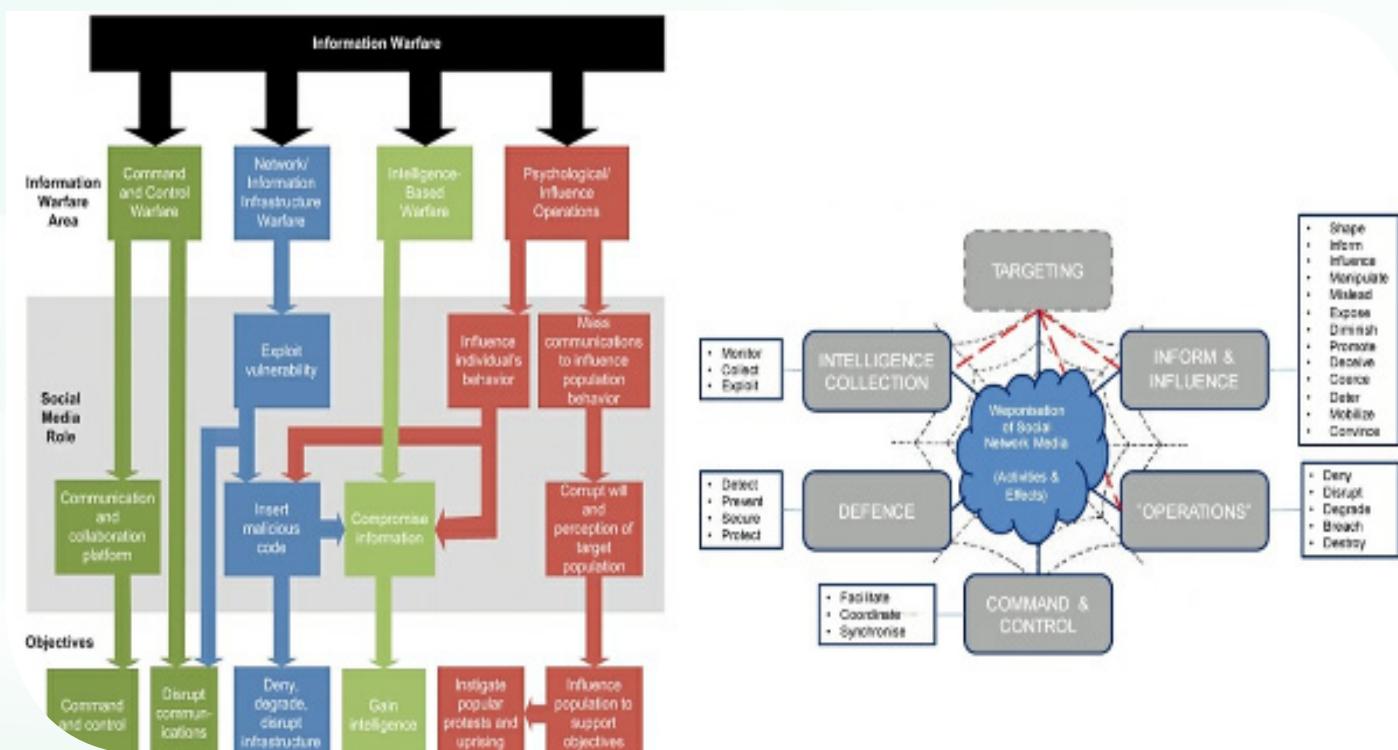
digunakan dalam perdebatan politik dan akademis untuk menggambarkan kompleksitas dan karakteristik konflik modern dimana aktor negara dan non-negara menggabungkan metode konvensional dengan metode yang terletak di luar pemahaman tradisional kita tentang operasi militer dalam strategi perang mereka.

Peperangan hibrida/perang hibrida dapat dicirikan sebagai bentuk peperangan yang terdiri dari campuran berbagai metode, baik konvensional dan non-konvensional, militer dan non-militer, terbuka dan terselubung yang melibatkan perang siber dan informasi yang bertujuan menciptakan kebingungan dan ambiguitas pada sifat dasar, asal dan tujuan dari tindakan ini, termasuk didalamnya adalah operasi informasi. Efek informasi dapat berdampak terhadap perkembangan konflik, karena persepsi audiens tentang hasil konflik lebih penting daripada fakta sebenarnya.

Di era perang hibrid, penggunaan media sosial sebagai alat dalam operasi/konflik/perang informasi sangatlah penting. Media sosial memiliki keunggulan aksesibilitas, kecepatan, anonimitas, volume informasi yang tinggi, tidak ada batasan geografis.

Thomas Nissen menjelaskan peran sosial media dalam mempengaruhi publik yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada 'waktu damai' sebelum kekerasan atau perrusuhan terjadi, untuk membentuk wacana publik, media dan politik. Pengaruh, dalam konteks ini, adalah aplikasi sistematis dari informasi dan cara lain oleh aktor negara atau non-negara untuk secara diam-diam melemahkan atau menggulingkan pemerintahan demokratis atau organisasi internasional, mengobarkan perselisihan sipil demi kepentingan aktor tertentu.

Gambar . Sosial Media Sebagai Senjata Dalam Perang Informasi



Sumber: B.V. Niekerk, M. Maharaj. (2013). *Social Media and Information Conflict*, International Journal of Communication, 7, hal. 1175; Nato Strategic Communications Centre of Excellence. (2016). *Social Media As A Tool Of Hybrid Warfare*, hal. 11.

Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar ditujukan untuk memperlemah (membentuk) struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan militer suatu negara untuk memberikan pengaruh yang diinginkan. Pengaruh ini dapat ditujukan pada perubahan kontekstual atau perubahan perilaku dalam masyarakat dan dalam wacana politik dan pengambilan keputusan berikutnya. Perubahan kontekstual pada dasarnya berarti penggulingan pemerintah yang mengarah pada perubahan rezim, yang berpotensi mengarah pada pembentukan aliansi baru dan peninjauan kembali keanggotaan organisasi internasional dan ratifikasi perjanjian, konvensi, hukum dan perjanjian internasional. Perubahan ini tidak harus menjadi kekerasan, itu hanya bisa menjadi pertanyaan mempengaruhi pemilihan umum atau negosiasi internasional. Perubahan perilaku akan berarti bahwa pemerintah atau rezim saat ini tetap berkuasa, tetapi secara signifikan mengubah kebijakannya dengan cara yang mendukung tujuan strategis aktor.

The Guardian menyebutkan media sosial terutama *Facebook* dan *Twitter* telah dimanfaatkan untuk memanipulasi informasi. Media sosial digunakan untuk mempromosikan kebohongan, misinformasi dan propaganda oleh pemerintah dan individu. Tujuannya adalah mempengaruhi opini dan persepsi publik.

Pengaruh umumnya ditujukan untuk merusak stabilitas suatu masyarakat utamanya dalam waktu damai, untuk menciptakan kondisi yang dapat menyebabkan perubahan, baik secara kontekstual atau perilaku, yang disebabkan oleh kombinasi kegiatan yang terang-terangan maupun yang

terselubung. Seringkali isu-isu dan topik yang sangat emosional dan kontroversial digunakan, memberikan gambaran pada peristiwa sejarah atau saat ini yang umumnya sudah diketahui oleh penonton. Termasuk juga beberapa peristiwa diatur dan dibuktikan dengan peristiwa fiktif, orang-orang palsu (kadang-kadang aktor), sumber akademis yang tidak ada, teori konspirasi dan kontradiksi. Semua dilakukan untuk menciptakan efek yang diinginkan. Efek ini sering dikaitkan dengan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap pembentukan yang ada (media dan elit politik) dan ketakutan untuk masa depan (memobilisasi perilaku tertentu).

Dalam konteks strategi hibrida atau peperangan *non-linear*, bentuk media sosial *online* dan lainnya memainkan peran besar dalam upaya untuk memengaruhi persepsi orang tentang peristiwa dan topik terkini. Sebagian besar aktivitas di media sosial dalam konteks ini bersifat menipu, memanfaatkan pendekatan langsung dan tidak langsung untuk pembuatan konten dan penempatan, antara lain, rekayasa sosial dan *trolling*. Kebanyakan metode, meskipun, cenderung tidak langsung, karena sulit untuk membedakan antara 'orang' dan 'personas' online, atau antara profil media sosial yang nyata dan palsu. Yang terakhir ini banyak digunakan untuk 'rekayasa sosial' melalui salah satu orang yang mengoperasikan beberapa persona atau melalui penggunaan bot. Semua itu bertujuan untuk memanipulasi wacana publik di, dan melalui, media sosial.

b. Aplikasi Pesan Instan (Komunikasi Terenkripsi)

Selain media sosial, platform teknologi digital yang bersifat disruptif

dan dapat mengganggu stabilitas pertahanan keamanan nasional adalah aplikasi pesan instan, seperti *WhatsApp*, *Telegram*, dan sejenisnya.

Secara prinsip dan teknis, potensi penyalahgunaan aplikasi pesan instan hampir sama dengan media sosial. Manipulasi informasi, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, tidak terkontrol, dan tanpa pengawasan menjadikan aplikasi pesan instan sebagai ancaman keamanan nasional.

Sebagaimana media sosial, aplikasi pesan instan memiliki kelebihan yang serupa dengan kelebihan lain yaitu komunikasi terenkripsi, dan ketiadaan pengawasan dari otoritas pemerintah suatu negara. *WhatsApp* memungkinkan pengguna mengirim pesan, tautan, gambar, dan video ke pengguna lain. Tidak seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram*, tidak ada algoritma yang akan menentukan konten mana yang diperlihatkan kepada pengguna, tidak ada kemampuan bagi perusahaan luar untuk membeli iklan, dan diskusi-diskusi terjadi dalam grup pribadi.

Secara teori, hal ini membuat lebih sulit untuk memanipulasi dan ada sedikit kemungkinan skandal besar seperti *Cambridge Analytica*. Tetapi penggunaan enkripsi "end-to-end"nya berarti bahwa tidak seorang pun - bahkan pencipta aplikasi - dapat mencegat dan memantau pesan antarpengguna. Bahkan mengukur bagaimana sebuah cerita menyebar di *WhatsApp*, yang dimiliki oleh *Facebook* tetapi dijalankan sebagai bisnis independen, hampir tidak mungkin.

Tidak hanya *WhatsApp*, aplikasi *Telegram* juga dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk saling berkomunikasi secara privat untuk menghindari pengawasan negara.



Layanan ini kemudian berulang kali dipakai sebagai medium komunikasi dan koordinasi para pelaku terorisme dalam melancarkan aksinya di berbagai belahan dunia. Telegram, antara lain, digunakan untuk berkomunikasi oleh pelaku serangan di Paris pada 2015, serangan malam tahun baru 2017 di Turki, dan serangan di St. Petersburg pada April 2017. Di Indonesia, sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap pada Desember 2016 mengaku belajar membuat bom dengan mengikuti arahan lewat *Telegram*.

Penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan sangat rentan dalam penyebaran hoaks dan mobilisasi atau komunikasi jaringan teroris. Sejumlah negara di dunia, seperti India, Brazil, Kenya, termasuk Indonesia, menampakkan

kekhawatiran terhadap peran aplikasi pesan instan dalam penyebaran berita palsu. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan penyebaran berita bohong alias hoaks menjadi ancaman yang paling berat (26/9). Hoaks menjadi ancaman karena bisa memasukkan apa saja, (karena) yang diserang adalah pikiran".

c. *Drone/UAS*

Ancaman *drone* terhadap pertahanan dan keamanan nasional bukanlah hal baru. Insiden terbaru, di awal Agustus 2018, ancaman *drone* terhadap keamanan nasional terjadi di Venezuela saat percobaan pembunuhan terhadap Presiden Nicolas Maduro menggunakan *drone* yang dilengkapi dengan peledak. Sembilan hari sebelumnya, kelompok

teroris Houthi Yaman mengklaim telah mengirimkan *drone* bersenjata ke bandara internasional Abu Dhabi.

Sebelumnya, pada tahun 2011, Rezwan Feraud yang berusia 26 tahun ditangkap karena merencanakan serangan terhadap Pentagon dan bangunan di AS menggunakan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh yang mengandung bahan peledak C-4. Tahun 2013, Kanselir Jerman Angela Merkel mengalami insiden serupa saat menghadiri kampanye luar ruangan dan sebuah quadcopter kecil mendarat di platform di sebelah Merkel. El Mehdi Semlali Fahti ditangkap di tahun 2014, karena berencana menyerang gedung sekolah dan federal menggunakan pesawat kendali jarak jauh yang dilengkapi dengan perangkat peledak rakitan. Tahun berikutnya di 2015,

sebuah *drone* jatuh di halaman Gedung Putih, sementara di Jepang, sebuah *drone* ditemukan di atap kantor Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo. Di tahun 2017, Paspampres pernah memaksa mendarat sebuah *drone* yang terbang di lapangan silang Monumen Nasional (Monas).

Di tahun 2017, ISIS merilis video propaganda penggunaan *drone* dengan bom, dan menggunakannya dalam perang di Syria dan Irak.

Kejadian serangan menggunakan perangkat *drone*, seharusnya menyadarkan aparat keamanan

di berbagai negara bahwa utilisasi (*utilization*), proliferasi (*proliferation*), dan pemersenjataan (*weaponization*) beragam teknologi disruptif baru dapat menjadi ancamannya.

Platform drone/UAS dapat digunakan oleh elemen teroris atau kriminal untuk beberapa tujuan. Dalam kondisi tanpa modifikasi, *drone* dapat menciptakan gangguan publik, mengganggu operasi pesawat udara atau udara, mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan ilegal, dan dipekerjakan sebagai senjata kinetik. Sebagai alat transportasi, perangkat *drone* dapat

digunakan untuk menyelundupkan zat ilegal ke wilayah terlarang dengan melewati langkah-langkah keamanan tradisional. *Drone* juga dapat dipersenjatai dengan berbagai bentuk senjata, mulai dari bahan peledak yang tidak mematikan, proyektil, improvisasi, senjata pemusnah massal, atau bahkan melakukan serangan digital.

Bahkan beberapa *drone* hobi kecil bisa dipersenjatai dengan sekitar 3 kg bahan peledak plastik C4 atau beberapa granat fragmentasi, yang bisa menimbulkan banyak kerusakan. Dan *drone* bersenjata mungkin tidak



Sumber: Ben Watson. 2017. The Drones of ISIS. Defense One. <https://www.defenseone.com/technology/2017/01/drones-isis/134542/>

akan datang sendirian, mereka dalam kawanan, pada satu titik memiliki 10 di udara, secara bersamaan melaksanakan rencana penerbangan.

Tidak banyak yang menyadari risiko keamanan yang dihadirkan oleh perangkat *drone*. Tidak terbatas pada *drone* yang memiliki kapabilitas tempur (*UCAV*) seperti Predator, namun juga pada *drone* komersil seperti *quadcopter* dan sejenisnya yang seringkali dijual bebas di pasaran untuk keperluan edukasi, hiburan, maupun peliputan.

Dengan menjamurnya *drone* sejenis di pasaran, maka akan meningkatkan risiko keamanan negara dan keamanan

publik. Brian Buntz menyebutkan beberapa ancaman keamanan oleh *drone*, yaitu: ancaman di ruang udara, menjadi alat/kendaraan untuk senjata, mengganggu acara olahraga, *spionase* perusahaan, penyelundupan narkoba, tabrakan dengan pesawat sipil/militir, serangan terhadap sistem jaringan energi, kesulitan untuk menegakkan aturan, dan hacking berbasis *drone*.

Wallace dan Loffi mengkategorikan ancaman *drone/UAS* dalam 3 kategori sebagai berikut:

Klaas Jan de Kraker dan Rob van de Wiel menjabarkan beberapa skenario ancaman dalam situasi militer yang melibatkan *drone* mini dengan bobot

kurang dari 20kg. Pertama, dalam perhelatan publik di stadion, seorang teroris dapat meluncurkan *drone* bersenjata dari bangunan terdekat dan mengarahkan senapan mesin ke arah hadirin. Kepanikan akan memicu kerusuhan dan korban tewas terinjak. Kedua, *drone* melintasi kaca antipeluru yang melindungi seorang VIP (Very Important Person) lalu meledakkan granat. Ketiga, *drone* meluncurkan senjata kimia ke kompleks bangunan yang dijaga ketat. Perangkat bisa dilumpuhkan, namun serangan kimia berpotensi memancing ketakutan dan rasa panik para personel. Keempat, serangan langsung lewat penjatuhan granat ke jet-jet tempur yang tengah diparkir, dengan tujuan mengurangi kapasitas serangan pasukan.

Dalam penyelenggaran Asian Games 2018 di Jakarta, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan larangan menerbangkan *drone* pada pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Bila tetap nekat, sudah disiapkan penghalau.

"Kita tidak mau mengambil risiko ancaman *drone* menasdar di pejabat-pejabat VVIP. Kami dari TNI akan (menghalau) *drone* secara mobile dari 1-1,5 km (dari GBK). Apabila masih lepas, kita siapkan *drone buster*," ujar Marsekal Hadi dalam jumpa pers di Media Centre JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

Antisipasi serupa perlu dilakukan dalam kegiatan yang melibatkan pengamanan ekstra untuk melindungi keamanan publik, pejabat negara, dan obyek vital negara.



Sumber: Wallace, R. J., & Loffi, J. M. (2015). Examining Unmanned Aerial System Threats & Defenses: A Conceptual Analysis. *International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace*, 2(4), hal. 6.

d. Additive Manufacturing/AM (3D printing)

3D printing adalah salah satu dari berbagai proses dimana materi bergabung atau dipadatkan dibawah kontrol komputer untuk membuat objek tiga dimensi. Muncul dan berkembangnya teknologi *additive manufacturing (AM)* atau yang lebih dikenal dengan *3D printing* berpotensi disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tidak bertanggungjawab.

Johnson et.al menyebutkan dari beberapa potensi implikasi keamanan dengan adanya *AM*, ada dua bidang yang harus menjadi perhatian khusus bagi pembuat kebijakan: (1) proliferasi senjata kinetik dan non kinetik dan (2) dislokasi ekonomi.

Pengembangan *AM* akan memiliki implikasi keamanan yang mendalam, diantaranya membentuk taktik dan kemampuan para aktor negara dan non-negara. Industri pertahanan militer dan pertahanan AS telah mengakui manfaat yang ditawarkan *AM* untuk pengumpulan informasi peperangan dan intelijen. Saat ini banyak pihak, baik militer maupun non-militer tertarik untuk mengeksplorasi teknologi ini.

Kajian RAND menyatakan teknologi *3D printing* dapat bermanfaat bagi militer, ekstrimis keras dan bahkan penjahat jalanan, yang bisa menghasilkan senjata mereka sendiri untuk digunakan dan dijual. Kemunculan cetak biru senjata yang dapat diunduh secara bebas - meskipun efektivitas dan kemampuan

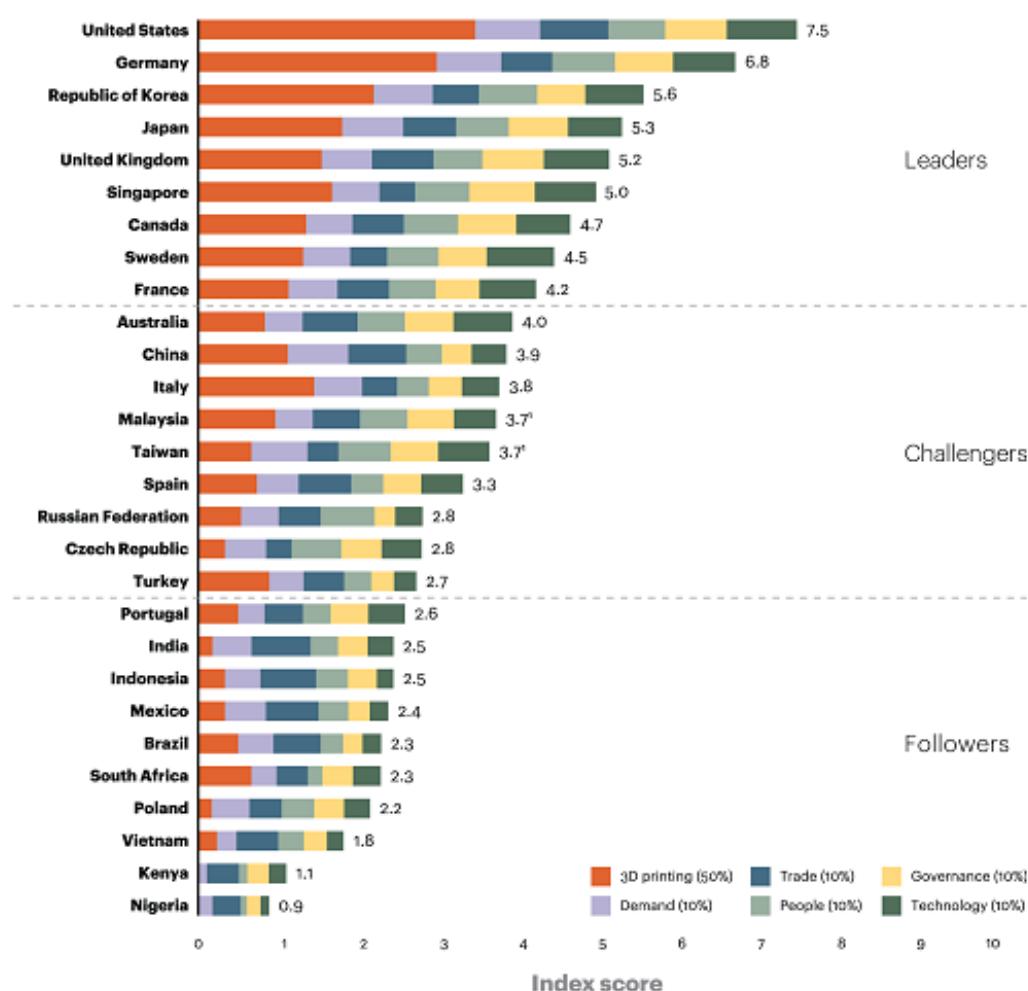
senjata dari yang dihasilkan dari *3D printing* tersebut masih diperdebatkan, hal ini akan memungkinkan orang untuk menghindari pemeriksaan dan membuka celah untuk membuat senjata api sendiri. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini, dan tanpa kontrol yang tepat, pelaku kekerasan mungkin dapat meniru sistem senjata yang lebih canggih, mencetak *drone* mematikan, dan bahkan memproduksi perangkat jamming atau umpan murah yang mengganggu pengumpulan intelijen.

Teknologi *3D printing* juga rentan terhadap *sabotase* oleh peretas yang dapat mengembangkan alat untuk menginstruksikan *printer 3D*

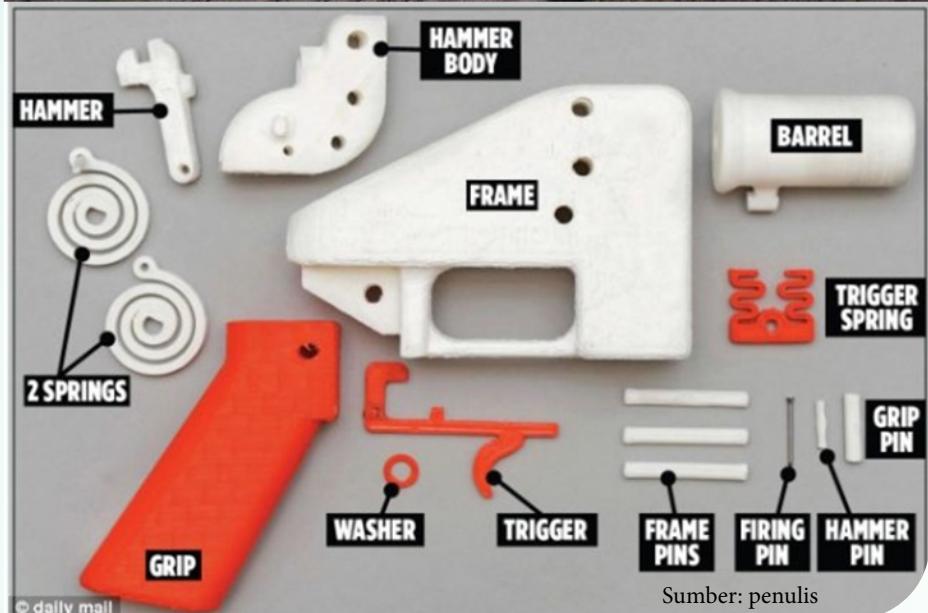
untuk memperkenalkan instruksi atau algoritma yang cacat ke dalam bagian-bagian pesawat yang sangat penting.

Pengembangan dan penyebarluas *AM* dapat secara signifikan mempercepat proliferasi senjata dan memiliki efek dramatis pada konflik internasional, ekstremisme kekerasan, dan bahkan kejahatan sehari-hari. Di tingkat domestik, konsumsi point-of-sale tidak lagi menjadi peluang bagi kontrol pemerintah atas barang-barang berisiko, seperti senjata api dan *drone*. Kedaulatan negara didasarkan pada monopoli kekuatan dan, setidaknya, kapasitas untuk mengatur senjata. *AM* akan lebih jauh melonggarkan kendali ini, memberikan akses yang

The 3D Printing Index assesses each country on six dimensions



Sumber: Sean Monahan, Sam Brannen, Angela Kurdys, Rafael Angelo. (2017). *3D printing: Disrupting the \$12 Trillion Manufacturing Sector*. AT Kearney. hal. 3.



lebih besar kepada warga sipil untuk senjata mematikan dan alat-alat kekerasan lainnya. Negara akan menghadapi ancaman yang semakin meningkat terhadap ketertiban umum karena semua orang dari pengunjuk rasa sampai anggota jaringan kriminal menjadi mampu memproduksi senjata dengan cepat. Dalam sebuah lokakarya, seorang mantan analis intelijen mengacu pada pengembangan potensial ini sebagai "BYO Weapon" (*Bring Your Own Weapon/ Bawa Sendiri Senjatamu*).

Ketika AM berproliferasi, baik kendali dan sanksi ekspor bisa menjadi jauh kurang efektif. Sanksi yang membatasi transfer teknologi dan

senjata bisa sangat lemah: dengan akses ke *printer*, bahan baku, dan desain, negara bisa lebih mudah mengatasi kesulitan pembatasan tersebut. Kebalikannya, AM mungkin secara tidak langsung mendukung kelangsungan hidup dan kebangkitan negara-negara seperti Korea Utara, yang tidak lagi menanggung biaya yang sama untuk mengundurkan diri dari masyarakat internasional.

Namun ancaman AM jauh melampaui dinamika antarnegara ini. Kelompok ekstrimis merupakan ancaman keamanan terbesar saat ini, dan mereka akan menjadi lebih berbahaya dengan proliferasi AM. Penyebaran AM akan berdampak

terhadap sulitnya kontrol senjata. Ini mengkhawatirkan para pembuat kebijakan bahwa teknologi yang digunakan untuk membuat perhiasan juga dapat digunakan untuk membuat suku cadang untuk senapan atau mesin roket.

Pelacakan terhadap kelompok ekstrem dan pertumbuhan mereka akan menjadi semakin sulit. Sementara, asesmen terhadap ancaman dan analisis keamanan lainnya sering bergantung pada informasi yang berkaitan dengan penjualan senjata dan akuisisi material lainnya. Jika kelompok ekstrem ini mampu memenuhi kebutuhan senjatanya melalui AM sebagai gantinya, maka hal ini akan menjadi jauh lebih sulit untuk mendeteksi atau mengganggu aktivitas mereka.

AM dapat meningkatkan risiko pembunuhan massal. Seekor serigala akan dapat memanfaatkan sumber daya besar yang tersedia secara online untuk mencetak senjata pilihannya. AM akan memperluas kumpulan pilihan ini, membuat lebih banyak senjata eksotis (mis., Sistem pengiriman bioterror) yang baru dapat diakses dan meningkatkan potensi mematikan serangan.

Pencegahan ancaman penggunaan AM akan lebih efektif jika difokuskan pada kontrol materi yang digunakan. Dengan membatasi pasokan bahan mentah yang langka atau berbahaya, regulator setidaknya dapat memastikan bahwa beberapa senjata yang merusak tidak menjadi mudah diakses.

e. Artificial Intelligence/ Kecerdasan Buatan (Deepfake Video)

Deepfake, merupakan gabungan dua kata, *deep* dan *fake*, yang artinya secara harfiah "pembelajaran



mendalam" dan "palsu", merupakan sebuah teknik sintesis citra manusia berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan). Ini digunakan untuk menggabungkan dan menempatkan di gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video.

Deepfake video merupakan suatu cara untuk memanipulasi audio dan video dari orang-orang nyata agar mereka melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka katakan atau lakukan. Secara teknis, *deepfake* adalah video yang dimanipulasi secara digital - yang, menggunakan rekaman yang ada dicampur dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, dapat dibuat agar terlihat seperti, atau dekat dengan, hal yang nyata. Dalam perang hibrida yang memanfaatkan segala maka teknologi video *deepfake* berpotensi menjadi ancaman stabilitas keamanan nasional.

Deepfake telah digunakan dalam berbagai kegiatan seperti membuat video porno palsu, atau video porno

balas dendam. Selain itu, *deepfake* juga digunakan untuk *sabotage* politik melalui video berita palsu dan *hoax* terkait politik.

Berita dan video palsu yang dibuat menggunakan *deepfake* dapat kemudian diamplifikasi melalui media sosial dan pesan instan dalam kompetisi politik nasional. Film-film tipuan dari para pejabat yang membuat pernyataan yang memecah-belah, bertindak korup atau berperilaku buruk dapat menjadi elemen yang akrab dari kampanye politik. Dalam masyarakat yang tingkat literasi teknologi dan informasi rendah, maka hal ini dapat meningkatkan potensi ancaman dan intensitas konflik.

Dalam konteks yang serupa, agen-agen intelijen mungkin menggunakan *deepfake* untuk memeras politisi, mempengaruhi pemilihan, menyebarkan propaganda, atau memperburuk ketegangan etnis dan agama. Kelompok teroris juga dapat menggunakan untuk menyebarkan propaganda dalam perang informasi di dunia siber.

Kesimpulan

Munculnya teknologi baru dan bersifat disruptif tidak dipungkiri memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Namun disisi lain, ada potensi pemanfaatan yang dapat mengancam keamanan nasional. Sangat penting untuk bereaksi terhadap ancaman yang muncul secara tepat waktu.

Kemampuan negara dalam mendekripsi serta mengantisipasi ancaman dari teknologi baru akan menentukan masa depan

keamanan negara. Permasalahannya, regulasi dan aturan perundang-undangan seringkali gagal mendekripsi munculnya ancaman dini terhadap pertahanan dan keamanan negara, karena perkembangan teknologi lebih cepat dari regulasi itu sendiri. Hal tersebut kemudian menjadi celah untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan mengancam keamanan nasional.

Dalam banyak kasus, regulasi menjadi tidak efektif, disisi lain, ada kesulitan dalam penegakan hukum. Dengan spektrum ancaman yang semakin kompleks, konsep perang yang juga berubah, akan menuntut kesigapan dan kewaspadaan aparat pertahanan keamanan negara, pola operasi baru serta doktrin baru.***

BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS : MINGINTEGRASIKAN KAPITAL SOSIAL DALAM UPAYA BELA NEGARA DI TINGKAT KOMUNITAS

Oleh:

Bayu A. Yulianto, M.Si

Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia



Sebagai sebuah nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat bela negara yang di dalamnya terintegrasi nilai-nilai patriotisme dan kecintaan warga terhadap negaranya, bisa dilihat sebagai satu modal penting bagi perkembangan bangsa Indonesia di masa depan. Modal dalam pengertian disini tentu bukan semata modal ekonomi (*economic capital*), ataupun modal fisik (*physical capital*), tetapi lebih kepada modal sosial (*social capital*). Dikatakan sebagai modal sosial, karena spirit bela negara itu merupakan tatanan nilai dan norma yang melekat di dalam struktur sosial

masyarakat Indonesia yang dalam beberapa hal, memiliki fungsi penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini.

Di sisi yang lain, banyak jenis-jenis kapital sosial yang sebenarnya juga hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kapital sosial yang sedemikian, dalam prakteknya juga memiliki fungsi yang cukup besar bagi pengatasan masalah sosial di masyarakat. Pada tataran yang lebih operasional, kapital sosial yang sedemikian memiliki

peluang untuk bisa diintegrasikan dengan konsep bela negara yang sedang digelorakan oleh Kementerian Pertahanan. Persoalannya, sejauh mana sebenarnya relasi antara konsepsi bela negara dengan konsepsi kapital sosial? Kemudian, kapital sosial seperti apa yang bisa menjadi modalitas penting dalam upaya bela negara oleh masyarakat dan negara? Dan pertanyaan terakhir, strategi pengembangan kapital sosial seperti apa yang bisa sejalan dengan upaya Kementerian Pertahanan untuk mendorong agenda-agenda kerja bela negara?

Konsepsi Bela Negara

Dasar konstitusional dari upaya bela negara tidak lain berasal dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 3, yang bunyinya "Setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Hal ini dipertegas lagi di dalam Pasal 30 UUD 45 yang bunyinya "tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Dalam Undang Undang Pertahanan Negara No. 3 tahun 2002, pada Pasal 9 yang menyebutkan bahwa "bela negara adalah sikap dan perilaku warganegara yang dijewali oleh kecintaannya pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dari aturan perundungan tersebut, Setiono (2017) kemudian menjabarkan tiga pertanyaan dasar tentang bela negara, yakni: Apa yang harus dibela dari negara? Mengapa negara harus dibela? Dan, Siapa yang harus membela negara. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa yang

harus dibela dari negara adalah kedaulatannya, keutuhan wilayahnya, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya, negara harus dibela karena negara harus tetap hidup dan survive untuk memperjuangkan kepentingannya ketika secara alamiah harus berhadapan dengan kepentingan negara lain. Sementara yang harus membela negara adalah mereka yang masuk dalam komponen bangsa di dalam sistem pertahanan semesta, seperti TNI, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, lembaga politik, dan seluruh warga negara.

Sementara itu, Zuhdi (2017) mengetengahkan perspektif historis dalam melihat penetapan Hari Bela Negara (HBN) pada tanggal 19 Desember. Menurutnya, HBN ditetapkan berdasarkan acuan historis terkait perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah Belanda yang hendak kembali menguasai Indonesia melalui agresi militernya yang kedua. Dengan membongkong pasukan Sekutu, Belanda berupaya

untuk merebut kembali Indonesia, setelah Jepang berhasil dikalahkan dan diusir dari Indonesia. Momentum ini menurutnya memperlihatkan bagaimana TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman pada saat itu terus melakukan perlungan dalam bentuk perang gerilya. Perlungan gerilya itu bisa berlangsung terus menerus karena TNI berjuang dengan dukungan penuh rakyat yang umumnya menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Disini, upaya rakyat untuk mendukung perjuangan TNI, merupakan representasi konkret dari semangat bela negara di masa lalu.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa bela negara sebagai sebuah tatanan nilai, hidup dan berkembang di tengah masyarakat sejak Indonesia sebagai sebuah negara bangsa modern berdiri dengan tegak pada 17 Agustus 1945. Keterlibatan masyarakat dalam membantu TNI berjuang melawan penjajah Belanda membuktikan bagaimana nilai kejuangan itu juga bukan hanya menjadi domain





kelompok militer, tetapi juga rakyat Indonesia. Jika kita tilik sejarah militer Indonesia sendiri, munculnya laskar-laskar perlawanan rakyat yang lahir dari rahim rakyat sendiri, memperlihatkan satu semangat bela negara yang melampaui persoalan-persoalan yang sifatnya formalistik dalam konteks militer. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa spirit bela negara itu sendiri juga berkembang di kalangan rakyat Indonesia. Dengan dasar itulah, strategi pertahanan yang kemudian digunakan oleh negara Indonesia, adalah strategi pertahanan semesta, dimana rakyat juga menjadi bagian penting dari upaya negara untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya dari ancaman pihak musuh.

Tidak hanya berhenti pada tataran nilai, gelora semangat bela negara yang sedemikian, pada gilirannya juga telah ditetapkan sebagai norma nasional yang mengikat seluruh rakyat Indonesia di dalam UUD 1945. Penetapan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia ke dalam

satu norma yang sifatnya mengikat ini menunjukkan bahwa negara telah sampai pada satu keniscayaan, bahwa tanpa adanya rakyat yang setia pada republik dan ikut serta dalam upaya membela negaranya, maka musik negara ini bisa bertahan.

Dalam perjalanan awalnya, program bela negara sendiri lebih ditekankan pada upaya TNI sebagai komponen utama nasional bersama dengan komponen cadangan dan komponen pendukung lainnya untuk mempertahankan negara dari rongrongan musuh. Tetapi dalam perkembangannya bela negara tidak saja berada pada domain perang, melainkan juga masuk pada area non perang, termasuk non militer. Sehingga dibutuhkan satu upaya untuk memaknai bela negara secara lebih luas dan relatif luwes.

Upaya bela negara juga bisa menyentuh parktik-praktik keseharian warga dalam meningkatkan kualitas dan prestasi kehidupan sosial di lingkungannya, seperti menjaga

kebersihan dan keamanan lingkungan; berperan serta aktif dalam upaya-upaya mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, baik dalam dunia *sains*, olah raga, maupun kesenian; atau turut membantu upaya-upaya kemanusiaan, seperti menjadi relawan bencana atau menjadi partisipan donor darah aktif. Segala macam upaya untuk meningkatkan kemajuan di dalam lingkungannya bisa masuk dalam kategori upaya bela negara seorang warganegara.

Perspektif Sosiologis tentang Kapital Sosial

Pengertian modal sosial sebenarnya mengacu pada konsep *social capital* yang banyak dikembangkan di negara-negara Barat. Dalam lidah orang Indonesia, *social capital* kemudian akrab dengan sebutan modal sosial. Robert Lawang (2005:5) mencoba memproblematisir penyerapan kata *social capital* sebagai modal sosial. Karena menurutnya, konsep *social capital* itu sendiri lekat dengan kapitalisme sebagai acuan.

Sementara dalam khasanah bahasa Indonesia, kapitalisme sendiri tidak selaras dengan pengertian modalisme. Disinilah problematika penyerapan frasa *capital social* menjadi modal sosial. Meskipun marak digunakan, tetapi masih ada problem mendasar yang tersisa terkait konsep tersebut. Meskipun penggunaan frasa modal sosial masih bisa dibenarkan, tetapi Lawang menyarankan sebaiknya kita menggunakan frasa kapital sosial agar tidak mengurangi makna asli dari *social capital*.

Menurut Lawang (2005:210), berdasarkan ragam konsep kapital sosial yang dikemukakan oleh para sarjana, maka kapital sosial dapat diartikan sebagai kekuatan sosial komunitas yang bersama-sama dengan kapital lainnya, tertambat pada struktur sosial mikro, meso dan makro, serta berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengetasan masalah.

Secara umum, kapital sosial bisa berarti satu kapasitas sosial yang di-

dalamnya terdiri dari sistem nilai, norma, rasa percaya (*trust*) dan jaringan sosial yang tertambat pada institusi sosial tertentu yang bisa difungsikan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk meningkatkan perekonomian suatu komunitas sosial. Kapital sosial juga dapat berkembang, apabila di dalam struktur sosial dimana kapital sosial itu tertambat, terdapat individu-individu yang bisa memainkan peran penting untuk memberdayakan ikatan sosial diantara anggota komunitas tersebut. Hal ini dalam kapital sosial dikenal dengan istilah *bounding social capital* yang orientasinya lebih ke dalam komunitas itu sendiri. Sementara konsep satunya lagi terkait dengan bagaimana komunitas itu bisa berjejaring dengan komunitas atau entitas lain yang berjarak dan berada di luar lingkungan tempat mereka tinggal. Optimalisasi jejaring sosial, secara sosiologis juga dikenal dengan istilah *bridging social capital*. Hal ini memungkinkan struktur sosial untuk bisa memberdayakan (*enabling*)

anggota serta institusi yang ada di dalam komunitas tersebut.

Karena sama-sama memiliki acuan kepada nilai-nilai dan norma sosial, maka kapital sosial jelas memiliki kedekatan fungsional dengan konsepsi bela negara. Jika relasinya sedemikian dekat, maka konsepsi kapital sosial sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat diintegrasikan dengan konsepsi bela negara yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan.

Mengembangkan Kapital Sosial dalam konteks Bela Negara

Integrasi bentuk-bentuk kapital sosial yang ada di dalam masyarakat dalam agenda bela negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, membuka kemungkinan untuk lebih memperkuat posisi masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional.

Kedekatan fungsional antara

Tabel 1. Konsep kunci kapital sosial

Penulis	Tertambat Pada	Variabel Independen	Variabel Dependen
Coleman (1988)	Struktur sosial, hubungan sosial, institusi	Fungsi kewajiban harapan, layak percaya, saluran, norma, sanksi, jaringan, organisasi	Tindakan aktor atau aktor dalam badan/hukum
Putnam (1995)	Institusi sosial	Jaringan, norma, kepercayaan	Keberhasilan ekonomi, demokrasi
Fukuyama (1995)	Agama, filsafat	Kepercayaan, nilai	Kerjasama, keberhasilan ekonomi
Turner (2000)	Hubungan sosial, pola organisasi yang diciptakan individu	Kekuatan	Potensi, perkembangan ekonomi.

Sumber: Lawang (2005:210)



konsep bela negara dan kapital sosial membuka peluang integrasi yang lebih besar. Hal ini bisa ditilik dari konsep utama kapital sosial seperti sistem nilai dan norma yang dikembangkan, institusi sosial yang menjadi tambatan dari kapital sosial yang dimaksud, serta rasa percaya (*trust*) yang tumbuh di dalam satu komunitas sosial yang bisa berdaya apabila berjejaring dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Dalam pengertian bela negara, rasa cinta tanah air dan rela berkorban warga untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, bukan saja berada pada tataran nilai, tetapi telah dirumuskan sebagai norma nasional sehingga hal tersebut mengikat setiap warga akan obligasi sosial yang harus mereka jalankan ketika negara membutuhkan atau memintanya untuk terlibat. Hal ini jelas melampaui persoalan kesadaran yang sifatnya individual, karena sebagai satu obligasi sosial, ia mutlak dipenuhi oleh seluruh warga yang tersebut di dalam

aturan tersebut. Inilah point pertama dan utama yang bisa menjembatani konsepsi modal sosial dengan agenda bela negara itu sendiri.

Berangkat dari pentingnya nilai dan norma sosial dalam konteks bela negara, maka agenda-agenda bela negara semestinya bisa diselaraskan juga dengan upaya negara untuk memperkuat institusi dan pranata lokal yang hidup di tengah masyarakat. Karena faktanya, banyak institusi dan pranata lokal yang memiliki kontribusi besar dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, seperti meredam konflik sosial atau meningkatkan pendapatan warga lokal. Dengan cara yang sedemikian, maka konsepsi bela negara bisa juga menyentuh isu-isu pada tingkat lokal yang relevan dengan upaya memajukan satu komunitas masyarakat. Dan bela negara yang acuannya pada perspektif pertahanan dan keamanan, jadi memiliki makna yang lebih luas, baik secara sosial maupun ekonomi.

Berikutnya, jika melihat institusi sosial yang berkembang di Indonesia, baik lembaga pemerintah, organisasi massa, partai politik, maupun institusi informal yang ada di tengah masyarakat, kita bisa mengetahui bahwa institusi tersebut memiliki peran penting di tengah masyarakat. Merujuk pada perspektif kapital sosial, semestinya institusi itu mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sehingga banyak persoalan sosial yang bisa diselesaikan dengan megoptimalkan rasa trust tersebut. Kendati demikian, tidak semua lembaga negara mendapat trust yang tinggi dari masyarakat. Sebagian malah dianggap belum optimal dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Sebagai contoh, berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA yang diakses dari laman portal Detiknews (2018), diperoleh data bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga



negara cukup beragam. Dari mulai TNI yang mendapat kepercayaan paling tinggi (90,4%), kemudian KPK (89%), Polri (87,8%), BPK (79,6%), dan seterusnya. Sementara DPRRI yang di dalamnya berisikan anggota-anggota partai politik justru hanya mendapat kepercayaan sebesar 65% (yang paling rendah diantara semua lembaga negara yang disurvei). Dengan kata lain, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara sangat beragam. Artinya, *trust* masyarakat terhadap lembaga negara bisa dikatakan juga beragam. Ada pekerjaan rumah yang cukup besar untuk bisa meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap semua lembaga-lembaga negara tersebut, terutama dalam kaitan upayanya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di tingkat masyarakat.

Pada titik ini, pekerjaan rumah yang dimaksud juga bisa diletakkan sebagai satu agenda kunci dari praktik bela negara pada tingkat makro, dengan upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik oleh lembaga negara. Bela negara dalam konteks ini jelas memiliki artikulasi politik yang cukup kuat, meskipun bukan dalam pengertian politik sehari-hari, tapi

politik dalam konteks meningkatkan pelayanan publik oleh lembaga negara kepada masyarakat.

Bela negara juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat yang mencakup apa yang kita kenal dengan istilah *local wisdom* atau kearifan lokal. Banyak kearifan lokal yang menjadi bagian dari tradisi dan budaya di masyarakat yang fungsional terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam cakupan yang lebih luas, nilai-nilai ini bahkan bisa mendatangkan potensi ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat melalui pengembangan agenda pariwisata, maupun pengembangan usaha kecil menengah. *Local wisdom* yang seperti ini adalah representasi dari kapital sosial yang berkembagn dalam masyarakat. Oleh karenanya, upaya sebagian kalangan untuk terus melestarikan budaya lokal, dalam hal ini patut diapresiasi sebagai satu kerja konkret dari bela negara pada tataran komunitas.

Atas dasar berbagai penjelasan itu, maka agenda-agenda bela negara yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, maupun politik bisa dikerangkakan dalam cakupan yang lebih luas. Oleh

karenanya, Kementerian Pertahanan perlu untuk membuat satu strategi implementasi konsepsi bela negara dalam konstruksi yang lebih luas dengan berbasiskan pada kapital sosial yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat. Sebuah agenda bela negara yang diperuntukkan bagi komunitas sosial yang memiliki kecintaan tinggi pada negara dan fungsional bagi perkembangan masyarakat itu sendiri.***

Daftar Pustaka

Coleman, James, 1988, *Social Capital in the Creation of Human Capital*,

Dasgupta P. and Ismail Serageldin (ed), 2000, *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, hal 13-39.

Fukuyama Francis, 1995, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, NY Free Press.

<https://news.detik.com/berita/4143291/lsi-denny-ja-tni-paling-dipercaya-publik-dpr-peringkat-terbawah>

Lawang, Robert, 2005, *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik*: Suatu Pengantar, FISIP UI Press

Putnam, Robert, 1995, *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*, Journal of Democracy, 6:65-78.

Setiono, Kup Yanto, 2017, *Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*, Wira Edisi Khusus 2017, Kementerian Pertahanan.

Zuhdi, Susanto, 2017, *Bela Negara dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Wira Edisi Khusus 2017, Kementerian Pertahanan.

PENCAPAIAN PROGRAM BELA NEGARA

Oleh:

Drs. Panca Mugi Priyatno, M.MHan

Analis Pertahanan Negara Madya Setditjen Pothan Kemhan



Pendahuluan

PSistem pertahanan negara Indonesia didesain sesuai dengan spektrum ancaman yang dihadapi, didefinisikan sebagai ancaman belum nyata dan ancaman nyata. Ancaman belum nyata, yaitu ancaman perang terbuka antar negara yang kecil kemungkinannya terjadi. Sedangkan ancaman yang nyata adalah yang sedang dialami oleh negara sendiri diantaranya adalah ancaman terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam dan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan

pencurian Sumber Daya Alam, wabah penyakit, perang siber dan Inteligen serta peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Spektrum ancaman yang semakin kompleks dewasa ini membuat adanya analisis yang terus menerus termasuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghadapi ancaman. Presiden RI pada sambutan peringatan hari Bela Negara 19 Desember 2014 menegaskan bahwa saat ini tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sifatnya sudah multidimensial. Ancaman berkembang menjadi multidimensial karena karakter

ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga mengharuskan kita untuk mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan Bela Negara.

Bela Negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi; mulai dari petani, buruh, profesional sampai dengan pedagang, yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga negara.

Kementerian Pertahanan telah menerbitkan Kebijakan Pertahanan Negara yang dalam arah kebijakannya adalah mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Tulisan ini mengulas tentang kebijakan dan strategi Kementerian Pertahanan dalam mengelola program Bela Negara, serta pencapaian program Bela Negara.

Kebijakan Dan Strategi Program Bela Negara

Sasaran kebijakan Bela Negara yaitu terwujudnya peningkatan kesadaran bela negara melalui Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) guna mewujudkan warga negara yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti

dan sopan santun, serta mempunyai karakter yang kuat dan tangguh, yang dilakukan secara terpadu, dan bersinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian/Lembaga, Pemda, serta komponen bangsa lainnya. Kegiatan bela negara dilaksanakan secara berlanjut melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan guna membentuk kader bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

Terkait dengan kebijakan Bela Negara, Kementerian Pertahanan telah menyusun regulasi tentang Bela Negara, yaitu Permenhan No: 32 tahun 2016, tanggal 6 September 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Regulasi ini sebagai payung hukum operasional kegiatan PKBN. Oleh karena itu membentuk sistem pertahanan semesta yang tangguh, perlu diadakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga

negara Indonesia. Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam membangun daya tangkal, guna memperkokoh pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan gangguan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Pada dasarnya Pembinaan Kesadaran Bela Negara ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara, baik secara fisik maupun mental.

Disamping penyusunan regulasi tersebut diatas, telah disusun pula Desain Induk PKBN. Desain ini berisi



arah kebijakan pelaksanaan PKBN nasional untuk kurun waktu 2015-2040. Sedangkan *Road Map* PKBN adalah bentuk operasionalisasi Desain Induk PKBN yang disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan merupakan rencana rinci pelaksanaan PKBN dari tahap ke tahap selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Desain Induk PKBN 2015-2040 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan *Road Map* PKBN, yang merupakan living document, dimana dalam perkembangannya dapat bersifat dinamis mengacu kepada perkembangan peraturan, kebijakan dan bersifat fleksibel.

Sasaran pada lima tahun pertama difokuskan pada Penataan Manajemen PKBN yang terdiri dari sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan pengerahan dan Sarana Prasarana kader Bela Negara oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,

dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

- Terbangunnya kesepahaman antar Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri serta komponen bangsa lainnya dalam penyelenggaraan PKBN, dalam membentuk karakter bangsa.
- Tersusunnya peranti lunak sebagai pedoman penyelenggaraan PKBN bagi Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri
- Tersusunnya kurikulum, modul dan materi pelaksanaan PKBN yang komprehensif.
- Terwujudnya standar, norma, kriteria dan prosedur dalam penyelenggaraan PKBN.
- Terbangunnya sistem
- informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN secara nasional.
- Terselenggaranya PKBN di lembaga diklat masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan tupoksinya
- Terselenggaranya PKBN secara terpadu dan bersinergi antar Kementerian/Lembaga serta seluruh pemangku kepentingan.
- Terbentuknya kader Bela Negara yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara untuk pertahanan negara.
- Terbinanya Kader Bela Negara secara berkesinambungan sebagai Kader Kementerian/Lembaga dalam pemberdayaan Lembaga kewaspadaan





Nasional, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Negara

- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI, Polri dan Pemangku kepentingan lainnya.
- Terlokasikannya anggaran oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemda serta seluruh pemangku kepentingan
- Tercapainya Kader Bela negara sebanyak 40 % dari jumlah penduduk.

Sasaran pada lima tahun kedua difokuskan pada Penguatan Manajemen PKBN, kemampuan dan kesadaran Kader Bela Negara yang dipadukan dengan fungsi Kementerian/Lembaga dalam penyiapan kondisi untuk kewaspadaan

Nasional, Ketanggapdaruratan serta Pertahanan Negara, dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024.

Sasaran pada lima tahun ketiga difokuskan pada Pemantapan Manajemen PKBN dan kelembagaan Kader Bela Negara pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Lembaga masyarakat untuk peningkatan kapasitas keterlibatan kader untuk kewaspadaan Nasional, Ketanggap daruratan serta Pertahanan Negara dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN (2025-2029)

Sasaran pada lima tahun keempat difokuskan pada Pengembangan Manajemen PKBN, kemampuan dan kualitas Kesadaran Bela Negara pada seluruh warga negara Indonesia untuk kewaspadaan Nasional, Ketanggap daruratan serta Pertahanan Negara dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN (2030-2034).

Sasaran pada lima tahun kelima difokuskan pada Aktualisasi terlaksananya PKBN secara Nasional dalam menjamin terwujudnya WNI yang memiliki kemampuan dan Kesadaran Bela Negara yang berkesinambungan dari generasi ke generasi untuk kewaspadaan Nasional, Ketanggap daruratan serta Pertahanan Negara, dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN (2035-2040)

Pembangunan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara Indonesia diperlukan suatu sistem Pembinaan yang disebut Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Dalam prosesnya selain dimaksudkan untuk pembekalan nilai-nilai bela negara, wawasan kebangsaan, dan wawasan nusantara dalam pembentukan karakter bangsa bela negara untuk mewujudkan kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional yang pada akhirnya terciptanya pertahanan



Sumber: pusdatin.rri.co.id

negara yang tangguh yang bersifat semesta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan Subsistem dari penyelenggaraan pertahanan negara.

Dalam konteks saat ini, Penyelenggaraan PKBN telah dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga yang bersifat parsial, tertentu dan tidak menyeluruh sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu penyelenggaraan PKBN diharapkan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan komprehensif.

Upaya untuk terciptanya penyatuhan langkah di antara Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya yakni dengan membangun perangkat sistem terpadu yang mencakup unsur-unsur perangkat kebijakan, sumber daya manusia PKBN, membangun infrastruktur PKBN, dan menyiapkan sarana pembinaan dan pembelajaran serta kelembagaannya.

Pencapaian

Peningkatan kesadaran Bela Negara serta penyiapan sumberdaya nasional yang handal dan profesional guna terciptanya kemampuan daya tangkal negara dan bangsa terhadap setiap hakekat ancaman yang bersifat multi dimensional merupakan salah satu tugas Ditjen Pothan.

a. Beberapa produk regulasi Bela Negara yaitu:

- 1) Per Sekjen Kemhan No: 11 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014. tentang Brevet Bela Negara
- 2) Kepmenhan No: Kep/1185/M/XI/2015. tanggal 30 November 2015. tentang Buku Penyelenggaraan PKBN bagi WNI di LN.
- 3) Kepmenhan No: Kep/1184/XI/2015 tanggal 30 November 2015. tentang Materi PKBN bagi Guru SMA/ SMK/MA.
- 4) Kepmenhan No: Kep/1183/XI/2015 tanggal 30 November 2015. tentang Materi PKBN bagi Guru SMP/ MTs.
- 5) Kepmenhan No: Kep/1182/XI/2015 tanggal 30 November 2015. tentang Pengukuran PKBN.
- 6) Kepmenhan No: Kep/1181/XI/2015 tanggal 30 November 2015. tentang Penyelenggaraan PKBN.
- 7) Permenhan No: 32 tahun 2016, tanggal 6 September 2016. tentang Pedoman PKBN.
- 8) Permenhan No: 5 tahun 2017, tanggal 14 juni 2017. tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader BN.
- b. Sasaran kegiatan program
- 1) Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada seluruh lapisan masyarakat.

- 2) Focus Group Discussion (FGD), Seminar dan Bimbingan Teknis.
- 3) Kegiatan melalui Forum Bela Negara.
- 4) Paparan di berbagai Institusi Pendidikan.
- 5) Konferensi Internasional.
- 6) Upacara Hari Bela Negara.
- 7) Pelayaran Bhakti Bela Negara.
- 8) Pencerahan kepada Warga Binaan dan Pegawai Lapas.

c. Produk sosialisasi Bela Negara

- 1) Media Elektronik; melalui media TV dan, Radio.
- 2) Media Cetak; Koran dan Majalah

- 3) Media Sosial; facebook, Instagram, dan Twitter.
- 4) Media Luar Ruangan; Videotron, Stiker di kendaraan bus.

Sampai dengan tahun 2018, total akumulasi kader Bela negara mencapai 83,4 juta orang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian/Lembaga lainnya, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri. Dengan sasaran di 34 Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota serta wilayah perbatasan Papua, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan.

Penyebarluasan Bela Negara juga dilakukan melalui konten media sosial. Kita sadari bahwa era sekarang adalah era digital. Jumlah pengikut Twitter 811, Instagram 11.000 dan Facebook 15.071.

Seterusnya adalah film action remaja yang rilis pada 2017, ditulis oleh Bagus Bramanti dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini merupakan strategi baru Direktorat Bela Negara, Ditjen Pothan, Kementerian Pertahanan dalam menyebarluaskan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara, khususnya kepada anak muda.

Demikian juga dengan Konser Kebangsaan Bela Indonesia. Konser ini menampilkan berbagai kreasi seni untuk menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pembangunan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara merupakan pembentukan karakter bangsa di berbagai bidang kehidupan yang bisa diwujudkan dalam



Sumber: pusdatin.rri.co.id



Sumber: beritacitra.com

Konser keBANGSAan

Sumber: pusdatin.rri.co.id

kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga Negara untuk cintai tanah air. Kesadaran Bela negara mewujudkan kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional, menciptakan pertahanan negara yang tangguh yang bersifat semesta. Oleh karena itu penyelenggaraan PKBN diharapkan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan komprehensif.

Supaya terciptanya Kesadaran Bela Negara yang masif maka Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Lembaga masyarakat serta komponen bangsa lainnya membangun perangkat sistem terpadu yang mencakup unsur-unsur perangkat kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan menyiapkan sarana pembinaan dan

pembelajaran serta kelembagaannya untuk pembinaan Kesadaran Bela Negara.***



Sumber: pusdatin.rri.co.id



Sumber: earthkaleidoscope.blogspot.com

SUDAH SIAPKAH KITA MENGHADAPI BENCANA ALAM?

Oleh:

Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han)

Wakil Direktur Bidang II Institut Kesenian Jakarta



Sumber: fin.co.id

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang penuh berkah. Daratannya yang hanya 1,3% luas daratan dunia begitu kaya akan keanekaragaman hayati, bahkan nomor dua terkaya di dunia setelah Brazil untuk keanekaragaman hayati darat dan nomor satu untuk keanekaragaman hayati laut. Namun di sisi lain, pernahkah kita berpikir, bahwa hal yang sedemikian itu juga sebagai akibat begitu dinamisnya kondisi alam Indonesia yang terletak di jalur cincin api dunia?

Cincin Api Pasifik yang keberadaannya membentuk

sebagian kepulauan Indonesia adalah jalur gempa paling aktif di dunia. Pergerakan tanah entah itu longsor atau likuifikasi, gempa, gunung meletus, tsunami, banjir, semuanya adalah fenomena alam yang kerap tidak bisa diprediksi ataupun dihindari. Namun demikian, dengan penggunaan teknologi tepat guna, kewaspadaan dapat ditingkatkan demi menekan risiko bencana hingga sesedikit mungkin.

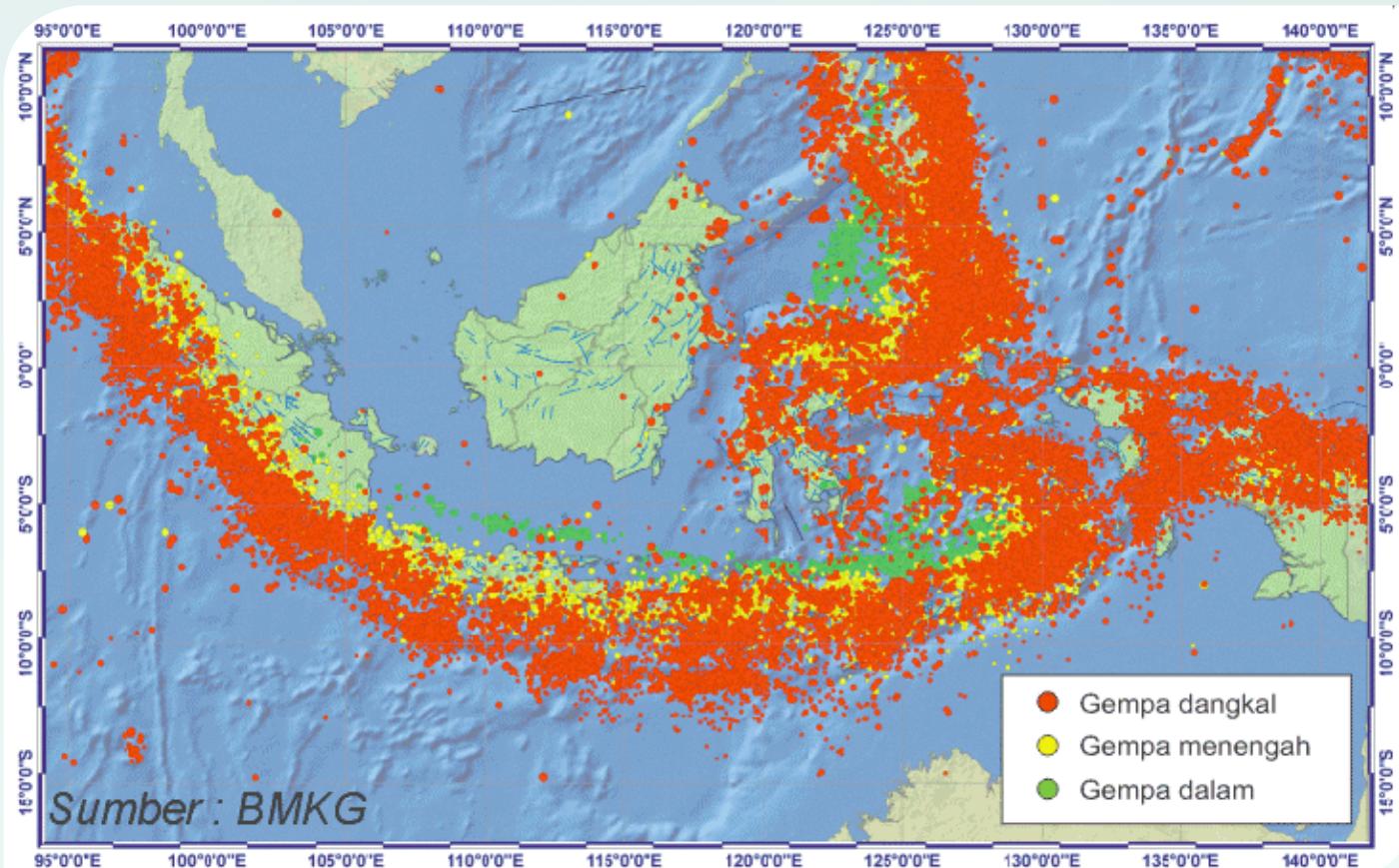
Efek jangka pendek suatu fenomena alam yang dianggap sebagai bencana mungkin terlihat begitu merusak. Akan tetapi, fenomena alam yang telah terjadi beratus-ratus tahun ini tidak

bisa dipungkiri adalah sumber keanekaragaman hayati Indonesia yang begitu kaya disertai beragam spesies endemik, tingkat kesuburan tanah yang tinggi, serta keindahan alam yang khas Indonesia.

Kesiapan Pribadi Menghadapi Bencana

Kesiapan pribadi dalam menghadapi situasi krisis atau bencana adalah hal krusial untuk meminimalisasikan terjadinya korban jiwa. Pemahaman kebencanaan, termasuk evakuasi dan keberadaan ruang evakuasi bencana pun menjadi hal yang mutlak diperlukan. Pendidikan

Gambar 1. Peta Kegempaan (Seismisitas) di Indonesia Periode 1973-2010



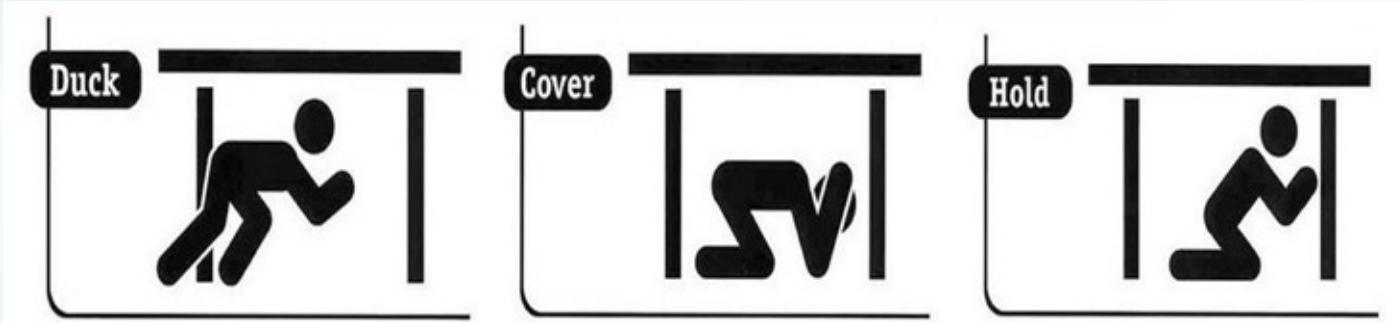
kesiapsiagaan dalam menghadapi kebencanaan terutama gempa bumi sangatlah penting dimulai sejak dini, baik di rumah ataupun di sekolah. Sebagai negara yang dilintasi sabuk vulkanologi (Lihat Gambar 1), gempa bumi di Indonesia sangat kerap terjadi dengan rata-rata 450 gempa per tahun dengan magnitude sama atau lebih dari 4.00 skala Richter. Oleh sebab itu, masing-masing individu setidaknya paham terhadap

teknik penyelamatan diri Duck-Cover-Hold (Lihat Gambar 2) yang masih dianggap sebagai respons pribadi terhadap gempa bumi yang paling efektif sejauh ini. Selain itu, pemahaman terhadap jalur evakuasi dan untuk segera menjauhi laut apabila terdapat potensi tsunami masih perlu terus digaungkan.

Kesiapan pribadi ini terutama diperlukan apabila bertempat tinggal

atau berkegiatan di kawasan yang berpotensi rawan kebencanaan. Data mengenai kawasan rawan bencana dengan informasi yang diperbaharui secara berkala, dapat dilihat di situs magma.vsi.esdm.go.id. Dengan mengetahui tingkat kerawanan bencana, setidaknya tingkat kewaspadaan dapat lebih ditingkatkan lagi dengan misalnya selalu menyiapkan stok makanan dan peralatan kedaruratan yang

Gambar 2. Drop-Duck-Cover



Sumber: ksl.com

mungkin diperlukan pada saat darurat. Kebiasaan tersebut perlu menjadi budaya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, termasuk juga dalam membangun rumah tempat tinggal atau bangunan lainnya.

Dalam sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, sebagian besar korban terjadi karena konstruksi bangunan yang ada ternyata tidak tahan gempa. Panduan mengenai bangunan tahan gempa pun telah banyak diberikan, dan pemenuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab para pribadi yang membangunnya mengingat tingkat pengawasan terhadap bangunan sangatlah terbatas.

Ketahanan Sosial Saat Bencana

Sebagaimana yang terjadi di Jepang, keberhasilan pengurangan terjadinya korban tidak terlepas dari konstruksi bangunan tahan gempa yang ada. Oleh sebab itu, dalam

setiap konstruksi bangunan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi perlu diperhatikan terutama apabila bangunan tersebut berada pada kondisi geografis yang rawan gempa agar kenyamanan lingkungan tetap dapat terbangun.

Selain itu, ketahanan sosial dalam menghadapi bencana pun tidak lepas dari keberadaan ruang evakuasi bencana. Sebagai bagian dari rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana wilayah dalam perencanaan tata ruang wilayah kota, keberadaan ruang evakuasi bencana dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana secara signifikan. Dalam hal ini, kerja sama seluruh komponen masyarakat dalam penataan ruang dan pembuatan konstruksi pun menjadi penting. Sebagai contoh, pemanfaatan bangunan hunian di mana area lantai dasar sebaiknya tidak digunakan sebagai area hunian, atap bangunan yang kokoh

sehingga dapat digunakan sebagai area penyelamatan dan evakuasi bencana hunian di bawahnya. Fasilitas umum dan sosial yang dapat menjadi area perlindungan dan penyelamatan penduduk sekitar, ruang terbuka sebagai area evaluasi dan area perlindungan terhadap bencana, serta pemanfaatan bukti alami yang dikonversi sebagai area penyelamatan untuk lingkungan sekitarnya seperti apa yang dikenal sebagai Daerah Hijau .

Untuk mewujudkan ketahanan sosial, diperlukan pula pembangunan yang inklusif sehingga masyarakat pun dapat terlibat. Di sini, sektor masyarakat dan swasta sangat berperan untuk segera memulihkan keadaan. Walaupun demikian, situasi tertekan secara kolektif dapat berujung pada masa krisis sosial yang harus diwaspadai. Hal ini dapat terjadi apabila kondisi yang sedemikian parah terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan gangguan terhadap susunan struktural normal dalam



Sumber: bmkg.go.id

Tabel 1. Pergeseran Paradigm Manajemen Bencana

DULU	SEKARANG
Tersentralisasi	Terdesentralisasi
Tanggap Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi	Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsediaan
Pengelolaan Dampak	Pengelolaan Risiko
Tanggup Jawab Sektor Tunggal	Tanggung Jawab Multisektor
Pendekatan Hazard Tunggal	Pendekatan Multihazard
Sektor Pemerintah	Sektor Masyarakat dan Swasta

sistem sosial masyarakat. Dalam kondisi demikian, kendali sosial pada masyarakat dapat menjadi hilang, dan kemudian berakibat pada hilangnya nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, ketahanan sosial perlu dibangun untuk menjadi modal masyarakat yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai guncangan sosial akibat bencana. Pembentukan modal sosial, baik *Bonding* (ikatan antara sesama anggota kelompok sosial), *Bridging* (ikatan lintas kelompok sosial), *Linking* (ikatan dengan kelompok sosial yang lebih tinggi atau otoritas) sehingga terjadi hubungan sosial yang kuat, dapat berujung pada tingkat kepercayaan sosial yang tidak mudah goyah. Di sini, dukungan terhadap ketahanan sosial muncul dengan sistem informasi krisis, bantuan kemanusian, dan beragam aksi kolektif sehingga masyarakat dengan cepat mampu kembali dari keterpurukan akibat bencana.

Bela Negara di Negeri Penuh Bencana

Sebagai daerah rawan bencana, Indonesia telah mengamanatkan

pentingnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana, sebagaimana kesepakatan dunia dalam *Hyogo Framework*, yang juga telah termaktub dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kerentanan yang ada sebagai akibat hidup di wilayah rawan bencana membuat masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah ini pun perlu berdamai dengan kondisi alam yang ada dan memiliki ketangguhan tersendiri terkait kemungkinan keterbatasan dalam penggunaan lahan agar mampu segera pulih apabila terjadi situasi bencana .

Oleh sebab itu, perlu sekali segenap pemangku kepentingan menyadari pentingnya penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana alam sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan masyarakatnya, sehingga kawasan rawan bencana seyogyanya adalah bagian dari kawasan lindung, dan dalam pelaksanaan penataan ruang. Selain potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, perlu pula diperhatikan

kondisi fisik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Hal ini ditambah pula dengan kesediaan ruang evakuasi bencana merupakan bagian dari rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana wilayah yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang wilayah kota karena penyediaan ruang evakuasi bencana ditujukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Kebutuhan penyiapan data dan informasi mengenai kebencanaan adalah bagian dari pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam hal ini, perlu ada pemberdayaan masyarakat, hubungan masyarakat yang erat, koneksi antarkelompok masyarakat, saling ketergantungan, komunikasi yang baik, dialog yang membangun, namun juga modal sosial yang menjamin itu semua. Kekurangsiagaan dan kekurangsiapan para pemimpin daerah pun menjadi sorotan terkait lambannya penanganan kebencanaan.

Berkenaan dengan kesiapsediaan terhadap bencana, hal yang menjadi krusial di setiap daerah di Indonesia



adalah penataan ruang yang berlaku. Menurut ketentuan yang ada, penataan ruang diperlukan dalam rangka upaya melestarikan dan merehabilitasi termasuk reboisasi kawasan dataran tinggi serta kawasan sungai berbasis sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) – untuk memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya (hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan karst, dsb.) serta perlindungan setempat (kawasan sungai, sempadan sungai, waduk, rawa, jalur patahan, kawasan pertambangan, dll.); memperbaiki dan memelihara sistem drainase perkotaan; dan menyiapkan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan jalur bantuan. Pengawasan yang dilakukan terhadap penataan ruang adalah tanggung jawab bersama, masyarakat di setiap daerah. Hal ini adalah pengembangan dari *Sendai Framework* dengan adanya pergeseran paradigma dalam manajemen bencana, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, di mana penanganan bencana menjadi

tanggung jawab bersama dan semua daerah dan negara pun saling berbagi informasi mengenai kebencanaan dan saling bahu-membahu dalam menghadapi bencana yang ada beserta dampak yang mungkin timbul.

Dalam rangka bela negara pula, mengingat dampak dari suatu kejadian bencana turut ditanggung oleh seluruh warga negara, maka diperlukan pula pemetaan kawasan terkait potensi bencana dan modal sosial yang ada secara integratif. Pembuatan Peta Kawasan terkait potensi bencana dimaksudkan sebagai upaya mitigasi yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sebagai kendali pemanfaatan ruang, dalam penerapan dan pengawasannya perlu dipantau tidak hanya dari pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai penerapan upaya bela negara sesungguhnya. Pendataan

modal sosial setiap daerah pun dianggap perlu mengingat hal ini sangat penting untuk tetap menjaga kondisi negara tetap stabil dan tetap tangguh meski di saat bencana sekalipun. Keberadaan pemetaan sosial pun dapat menjadi titik tolak penanganan bantuan yang diperlukan sehingga respons dari pemerintah pusat atau daerah lain pun dapat diberikan dengan cepat dan tepat guna.

Simpulan

Untuk menjawab pertanyaan “Sudah siapkah kita menghadapi bencana alam?” diperlukan cek dan kemudian pengecekan kembali terhadap penguatan kapasitas dalam penanggulangan kebencanaan. Penguatan kapasitas ini tidak hanya dari pemerintah semata dengan perbaikan sarana, prasarana dan kelembagaan, tetapi juga diperlukan kesadaran publik yang menjadi penentu pula dalam pengelolaan risiko kebencanaan.

Pergeseran paradigma kebencanaan yang ada sangat menekankan peran penting masyarakat dan pihak swasta serta koordinasi antar lembaga. Khususnya di Indonesia, hal utama yang menjadi perhatian mengingat banyaknya korban jiwa dan harta benda, termasuk juga dampak lingkungan yang sangat terasa adalah adanya kebijakan pengelolaan dan/atau penanggulangan bencana serta penataan ruang untuk dapat melaksanakan dan mempertahankan suatu sistem yang efisien, efektif, dan terkoordinasi untuk mengelola bencana dalam rangka meminimalkan kerugian, jumlah korban ataupun gangguan yang ditimbulkan. Kegiatan semacam ini tidak dapat terjadi dalam waktu singkat, namun harus bersifat berkelanjutan, membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, namun semuanya itu perlu dilakukan untuk menjamin kehidupan yang baik di negeri yang penuh akan potensi bencana ini.***

Daftar Pustaka:

- A.H.Barton (1969). *Communities in disaster; A sociological analysis of collective stress situations* (1st ed.). Garden City, NY: Doubleday
- Andi Renald. 2008. "Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu dalam Perspektif Penataan Ruang" disajikan pada Pertemuan Ilmiah: Bencana Palu (Refleksi Lingkungan, Teknis, Sosial dan Tata Ruang), Senin 8 Oktober 2018 di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia
- Contoh Persyaratan Pokok Membangun Rumah yang Lebih Aman (Bangunan tembokan dengan bingkai beton bertulan) dapat dilihat di https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/topics/pdf/poster_edit_q.pdf
- Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*, yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah: (a) kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, a.l. kawasan hutan lindung, kawasan bergambar, dan kawasan resapan air; (b) kawasan perlindungan setempat, a.l. sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air; (c) kawasan suaka alam dan cagar budaya, a.l. kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; (d) kawasan rawan bencana alam, a. I. kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan (e) kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nuftah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.
- Hyogo Framework for Action (HFA) adalah cetak biru global untuk upaya pengurangan risiko bencana 2005-2015 dalam bentuk korban jiwa serta aset sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat dan negara. <https://www.preventionweb.net/drr-framework/hyogo/>
- National Geographic. Jumat 12 Desember 2012. *Hidup Mati di Negeri Cincin Api*. Dilihat pada 9 Oktober 2018 di <http://nationalgeographic.grid.id/read/13283321/hidup-mati-di-negeri-cincin-api>
- M.D. Turner. (2014). Political ecology I: An alliance with resilience? *Progress in Human Geography*, 38(4), 616-623. <https://doi.org/10.1177/0309132513502770>.
- Pasal 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Pasal 6 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Pasal 26 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Pasal 28 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Pasal 59 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang *Jasa Konstruksi*
- Pos Kupang. 8 Oktober 2018. *Wapres Kalla Nilai Pemda perlu belajar manajemen krisis hadapi bencana* dilihat pada 9 Oktober 2018 di <http://kupang.tribunnews.com/2018/10/08/wapres-kalla-nilai-pemda-perlu-belajar-manajemen-krisis-hadapi-bencana>
- R.L. Hawkins & K. Maurer. (2010) *Bonding, Bridging and Linking: How Social Capital Operated in New Orleans following Hurricane Katrina* British Journal of Social Work. 40. 1777-1793
- Sendai Framework, dapat diakses di https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

MENHAN RI : INDONESIA DALAM PROSES JADI PRODUSEN ALUTSISTA DI KANCAH INTERNASIONAL



Indonesia telah mampu untuk mandiri dan dalam proses untuk menjadi produsen alutsista yang mampu berkiprah di kancah internasional. Hal ini bukan suatu yang ambisius tetapi sebuah realita yang harus diwujudkan bersama, karena pada dasarnya bangsa Indonesia telah ditakdirkan menjadi bangsa yang berpotensi besar untuk berinovasi dan mengembangkan industri yang berbasis teknologi canggih.

Perkembangan teknologi masa kini yang begitu pesat dan sarat dengan nuansa kompetisi global antar bangsa, pada gilirannya memiliki arti penting dalam menentukan eksistensi suatu bangsa. Hal ini terungkap saat Menhan RI Ryamizard Ryacudu memberikan keynote speech pada Indo Defence Business Forum di JIExpo Kemayoran, Rabu (7/11),

setelah mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membuka Indo Defence Forum and Expo 2018.

Tema yang diangkat dalam forum bisnis yaitu, "Promoting National Defence Industry" sangat relevan dan tepat waktu di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional yang berstandar internasional, maju, berkualitas dan modern.

Oleh karena itu melalui pameran ini, Menhan berharap Indonesia ingin menunjukkan capaian strategis yang ditunjukkan oleh industri dalam negeri Indonesia dalam menjawab tantangan dan peluang serta menjawab tantangan. Selain itu berharap forum ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan dan *roadmap* kementerian

dalam pengembangan industri pertahanan nasional.

Terkait implementasi UU No.16 tahun 2012 beserta aturannya, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah bersama agar upaya mencapai kemandirian industri pertahanan dalam negeri menjadi semakin cepat.

Hingga saat ini terdapat 68 industri yang telah ditetapkan sebagai industri pertahanan dalam berbagai tingkatannya. Hal ini perlu diakselerasi agar semakin banyak industri yang dapat berpartisipasi.

Menutup sambutannya, Menhan berharap bahwa suatu hubungan kerja sama harus dibangun dalam koridor kesucian dan ketulusan niat dan hati nurani serta dengan memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan.

MENHAN: INDO DEFENCE 2018 EXPO & FORUM DIHARAPKAN PERLUAS PASAR BAGI PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI



Menhan berharap pameran *indo Defence* 2018 akan membuka dan memperluas pasar bagi produk industri pertahanan Indonesia baik sebagai produk utuh maupun sebagai bagian dari mata rantai industri pertahanan global.

I“Sasaran strategis diselenggarakannya *Indo Defence* 2018 Expo & Forum ini dalam rangka mempromosikan produk industri pertahanan nasional serta guna memperkuat kolaborasi industri pertahanan dalam negeri Indonesia dengan industri pertahanan negara sahabat yang pada gilirannya dapat menunjang terealisainya kemandirian industri pertahanan nasional Indonesia”, ungkap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada acara pembukaan *Indo Defence* 2018 Expo & Forum.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, pada *Indo Defence 2018 Expo & Forum* ini hadir dipamerkan salah satu produk baru industri pertahanan nasional yaitu Medium Tank produksi PT. Pindad yang bekerjasama dengan FNSS, Turki. Medium Tank ini adalah sebagai bentuk dukungan Penuh Pemerintah terhadap produk anak Bangsa.

“Industri pertahanan yang mandiri dan maju tentunya akan dapat membantu proses pertumbuhan dan kemandirian ekonomi dalam negeri yang sejalan dengan Visi Nawa Cita Presiden RI”, tutur Menhan.

Indo Defence 2018 Expo & Forum merupakan pameran industri dan teknologi pertahanan yang dalam

pelaksanaannya digabungkan dengan *Indo Aerospace* dan *Indo Helicopter* berupa pameran Kedirgantaraan, Teknologi Bandar Udara dan Industri Helikopter, serta *Indo Marine* yang merupakan pameran kemaritiman dan bahari, galangan kapal serta teknologi pelabuhan.

Indo Defence 2018 Expo & Forum merupakan ajang promosi bagi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional yang digelar setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan PT Napindo Media Ashatama sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan lokal dengan cara membangun kemitraan dengan pihak asing.***

MENHAN RI DAN MENHAN MALAYSIA SEPAKAT PERLUNYA MOU KERJASAMA PERTAHANAN



Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan Malaysia Haji Mohamad bin Sabu memandang penting perlunya kerja sama pertahanan kedua negara dituangkan ke dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

Hal tersebut disepakati Menhan RI dan Menhan Malaysia saat keduanya bertemu dalam sela-sela pertemuan tahunan Sidang General Border Committee Malaysia Indonesia (GBC Malindo) ke-41 Tahun 2018, Kamis (15/11) di Bali.

"Diharapkan kedepan sudah ada MoU, karena sangat penting sebagai landasan bagi kerja sama yang dilakukan kedua negara di bidang pertahanan", ungkap Menhan RI.

Lebih lanjut Menhan RI mengatakan, perjanjian kerja sama pertahanan antara

Malaysia dan Indonesia masih menggunakan dokumen Security Arrangement (1984) atau SA-84 yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan dan pembahasan oleh tim dari kedua negara.

Penyempurnaan SA-84 diharapkan akan dapat mendekatkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia yang sudah sangat erat dan dapat saling memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kestabilan di kawasan.

Menhan RI mengatakan, kerja sama di bidang pertahanan telah terjalin baik selama ini, baik antar Kemhan kedua negara maupun antar Angkatan Bersenjata. Mulai dari kegiatan Peluncuran Patroli Maritim Trilateral di Tarakan Kalimantan pada bulan Juli 2017, Sidang GBC Malindo ke-40 di Kuala Lumpur pada 28 September 2017, Peresmian Trilateral Air Patrol di Subang pada 12 Oktober 2017 serta penandatanganan Joint Statement Our Eyes pada Februari

2018 yang lalu pada saat ADMM retreat di Singapura.

Sementara itu, Menhan Malaysia juga mengatakan, kerja sama pertahanan dan juga kerja sama antara Angkatan Bersenjata antara Indonesia dan Malaysia diharapkan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Untuk itu, Malaysia juga berharap draft MoU kerja sama pertahanan kedua negara dapat segera diselesaikan pada akhir tahun ini.

Kerja sama pertahanan yang perlu ditingkatkan kedua negara diantaranya di bidang industri pertahanan dan juga kerja sama dalam mencegah berkembangnya terorisme dan radikalisme di kawasan. "Hubungan kedua negara yang saat ini dalam hubungan yang sangat istimewa, harmoni dan dalam tahap yang tinggi, perlu ditingkatkan dari masa ke masa", ungkap Menhan Malaysia.***



KOMITE KERJA SAMA PERTAHANAN GABUNGAN INDONESIA - ITALIA KEDUA 2018

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdyo TNI Hadiyan Sumintaatmadja membuka kegiatan Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) Indonesia-Italia kedua tahun 2018. Selasa (27/11) di Board Room Hotel Borobudur, Jakarta.

Sekjen Kemhan RI mengatakan, JDCC adalah komite pertahanan bersama dengan pertemuan rutin setiap dua tahun, berdasarkan pengaturan teknis antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia. "Mengenai kerangka acuan kerja sama pertahanan bersama yang ditandatangani pada 13 Oktober 2016 dan mulai pada 2016, sekarang menjadi JDCC kedua", ujar Sekjen Kemhan RI.

Forum tersebut sangat penting dan memberikan banyak keuntungan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan. Delegasi Italia juga

berkunjungan ke PT. Pindad dan PT. Len di Bandung. Kunjungan delegasi Italia dipimpin oleh Letnan Jenderal Nicolo Falsaperna selaku Sekretaris Jenderal Pertahanan Republik Italia memperoleh pandangan yang jelas tentang bagian dari industri pertahanan.

"Sebagai negara utama di Eropa dan NATO, Italia memiliki peluang besar untuk menjadi mitra tradisional Indonesia yang baik dalam kerja sama pertahanan, pendidikan, dan pelatihan pertahanan. Total sudah 57 personel militer Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Italia hingga 2018", tegas Sekjen Kemhan RI.

Melalui JDCC kedua 2018, Kemhan RI telah memperbarui informasi tentang kerja sama pertahanan bilateral, telah berhasil mengidentifikasi kemungkinan untuk meningkatkan hubungan pertahanan di masa mendatang.

Sekjen Kemhan RI sangat berharap bahwa beberapa peluang kerja sama yang berharga dapat dicatat dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan dan menerapkan rencana tersebut dengan cara yang konkret.

Atas nama Kementerian Pertahanan RI, Sekjen Kemhan RI menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada delegasi Italia atas kontribusinya dalam pertemuan kali ini, berbagi, berdiskusi, dan mencapai banyak gagasan untuk meningkatkan hubungan pertahanan. Dengan harapan dua tahun lagi bisa bertemu di negara tercinta Italia***

KEMHAN RI MENERIMA ANUGERAH PREDIKAT KAPATUHAN TINGGI TERHADAP PENILAIAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DARI OMBUDSMAN RI



Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI, Senin (10/12) di Auditorium TVRI Jakarta menyerahkan predikat Survei Kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepatuhan Ombudsman Tahun 2018 dilakukan terhadap 9 Kementerian, 4 lembaga, 16 Provinsi, 49 Kota dan 199 Kabupaten. Hasil Survei Kepatuhan Ombudsman menyatakan tahun ini sudah tidak ada lagi Kementerian yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah.

Dari hasil survey yang dilaksanakan Ombudsman, Kementerian Pertahanan RI dinyatakan telah berhasil melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik, serta diberikan anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap penilaian Standar Penilaian Publik. Anugerah diberikan secara langsung oleh Menko Polhukam,

Wiranto, selaku wakil pemerintah kepada Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari 5 Kementerian negara yang masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Empat kementerian lainnya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penganugerahan ini merupakan Acuan Utama Pelayanan Publik Indonesia yang diberikan Ombudsman RI kepada instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

Penganugerahan predikat kepatuhan telah dilaksanakan oleh Ombudsman sejak tahun 2013 dengan hasil yang menunjukkan peningkatan secara bertahap. Metode maupun instrumen survei terus disempurnakan. Sejak tahun 2017, selain bertujuan menilai kepatuhan juga menilai kualitas penyelenggara pelayanan. Kedepan survei akan diarahkan untuk mengukur kualitas pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan penerima layanan.

Menhan pada kesempatan tersebut mengatakan penganugerahan ini adalah buah dari kedisiplinan dan kerja keras seluruh personel Kemhan khususnya di tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu juga bentuk sinergitas yang baik antara Kemhan dan TNI.***

FOTO KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAN DARI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPADA KORBAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU, SIGI DAN DONGGALA-SULAWESI TENGAH











INDO DEFENCE
2018 EXPO & FORUM

Hosted by
INDO ROSSPACE
2018 INDIA
INNOVATION
INDO MARINE
2018
INCORPORATING WITH



MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA



mengucapkan :

SELAMAT HARI NATAL

25 Desember 2018

DAN

TAHUN BARU

1 Januari 2019



WiRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

"INDO DEFENSE 2018 EXPO & FORUM" INCREASING THE PROGRESS AND CAPABILITY OF THE DOMESTIC DEFENSE INDUSTRY

RECOGNIZING THE IMPACT
OF TECHNOLOGY AND
DISRUPTIVE INNOVATION
ON NATIONAL SECURITY
THREATS

STATE DEFENSE IN A
SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE:
INTEGRATING SOCIAL CAPITAL
IN THE EFFORT OF STATE
DEFENSE WITHIN THE
COMMUNITY LEVEL

THE STATE DEFENSE PROGRAM
ACHIEVEMENT

ARE WE READY TO FACE THE
NATURAL DISASTERS?



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



Kemhan RI



Kemhanri



kemhan RI

ISBN 1693-0231



0 8771093023126

CONGRATULATIONS
TO
THE MINISTRY OF DEFENCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR
THE 2018 HIGH COMPLIANCE
PREDICATE AWARD
FOR PUBLIC SERVICE STANDARDS
BY
OMBUDSMAN
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
General (Ret) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Air Vice Marshal Hadiyan Sumintaatmadja

Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos .

Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public
Communication Center
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si.
Captain Lindu Baliyanto.

Graphic Designer:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Photo:

Photografers of Public Communication Center of
MoD

Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

Published by:

Public Communication Center of MoD,
Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457



Editorial



Dear kind readers,

We warmly greet you through this sixth edition of WIRA of November-December 2018. It brings throughs related to "Indo Defense 2018 Expo & Forum" Increasing the Progress and Capability of the Domestic Defense Industry; Recognizing the Impact of Technology and Disruptive Innovation on National Security Threats; State Defense in a Sociological Perspective: Integrating Social Capital in the Effort of State Defense within the Community Level; The State Defense Program Achievement Are We Ready To Face The Natural Disasters?.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

Editorial Team

Contents

ARTICLE

6

"INDO DEFENSE 2018 EXPO & FORUM" INCREASING THE PROGRESS AND CAPABILITY OF THE DOMESTIC DEFENSE INDUSTRY

The Indo Defense 2018 Expo & Forum is a promotional event for international defense and security equipment producers which is held every two years as a forum to strengthen the capacity of the local defense industry by building partnerships with foreign parties.



13

RECOGNIZING THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND DISRUPTIVE INNOVATION ON NATIONAL SECURITY THREATS



Defense and security threats do not always arise from sophisticated weapons or modern armaments. The rapid development of digital information and technology, the emergence of disruptive technologies and new innovations, have become "game-changers" that change the order and behavior of global security actors.

23

STATE DEFENSE IN A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE: INTEGRATING SOCIAL CAPITAL IN THE EFFORT OF STATE DEFENSE WITHIN THE COMMUNITY LEVEL

three basic questions about defending the country, namely: What must be defended from the state? Why should the country be defended? And, who must defend the country?



29

THE STATE DEFENSE PROGRAM ACHIEVEMENT

The Development of State Defense Awareness for all Indonesian citizens is needed a Development system called State Defense Awareness Development.

37

ARE WE READY TO FACE THE NATURAL DISASTERS?

Preparedness education in the face of disasters, especially earthquakes, is very important starting early, whether at home or at school!

"INDO DEFENSE 2018 EXPO & FORUM" INCREASING THE PROGRESS AND CAPABILITY OF THE DOMESTIC DEFENSE INDUSTRY

By:
Editorial Team



Indonesia re-carved history in the largest international scale of Defense Industry exhibition in Southeast Asia. For the eighth time, in 2018 the Government of Indonesia through the Ministry of Defense held an international exhibition on technology in the three-services defense industry, Indo Defense 2018 Expo & Forum. The exhibition was held in conjunction with aerospace and helicopter exhibitions, Indo Aerospace featuring Indo Helicopter 2018 Expo & Forum and the Indo Marine 2018 Expo & Forum maritime exhibition on 7 to 10 November 2018 at JIExpo Kemayoran,

Jakarta. This time the event featuring the latest defense industry products from various countries with its theme "Building Global Defense Partnerships to Secure the Future" and was opened directly by the Vice President of the Republic of Indonesia Jusuf Kalla. Several Working Cabinet Ministers, Heads and Members of the Republic of Indonesia Parliament and a number of officials from relevant Ministries / Institutions also witnessed the opening ceremony.

The Indo Defense 2018 Expo & Forum is a promotional event for

international defense and security equipment producers which is held every two years as a forum to strengthen the capacity of the local defense industry by building partnerships with foreign parties. The implementation of the Indo Defense 2018 Expo & Forum is part of the concept of Indonesia's defense diplomacy to increase interdependence in order to achieve world peace and prosperity. Besides, this prestigious event is used as an effective medium of communication and information to establish business contacts and technology transfer,

which ultimately contributes significantly to the development of the defense and security industry in Indonesia.

This year's Indo Defense 2018 Expo & Forum exhibition activity is very different and has increased quite rapidly in terms of the extent and number of attendances of participating countries. The Indo Defense 2018 Expo & Forum was attended by 867 exhibitors from 60 countries. In addition, 33 friendly countries officially sent around 193 Official Delegations to watch the exhibition. The countries present included among others Malaysia, Australia, Greece, Japan, Fiji, Belarus, Saudi Arabia, Slovakia and the United Arab Emirates. Whereas in terms of total area used in 2018 this increased by around 15 percent compared to 2016. There were two new halls, namely B3 hall and C3 hall at JIExpoKemayoran which were used for participants' booths to accommodate this year's membership target.

Foreign companies that took part in participating in the exhibition included among others Rheinmetall, SAAB, Lockheed Martin, KAI, FN Herstal, Beretta, Excalibur, SVOS, Nexter, Reutech, Turkish Aerospace Industries, Inc., and Polish Armanent Group / PGZ and other companies.

Some domestic and private defense industry companies also participated in the exhibition, including PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Len, PT Dahana, PT Sritex, Infoglobal, Bhimasena Group, PT Sentra Surya Ekajaya, PT Ridho Agung and others. In addition, there are also government agencies, universities and the media.

The exhibition opportunity was also used by several domestic defense industries to display live demonstrations from its excellence defense products. One of them like PT Pindad which displayed the prototype of the newest Medium Tank "Tiger". Likewise, PT Saba

Wijaya, PT Sri Rejekilsman, PT Sentra Surya Ekajaya (SSE), PT Cakra Tunggal Dharma, Sport Glove Indonesia, PT Promatra Nusantara (Rudy Project Indonesia), PT Motorola Solutions Indonesia and PT Mandira Jaya Abadi (MJA Tech) and fully supported by the Kostrad Reconnaissance & Combat Platoon to provide an understanding of the excellence of domestic production of defense equipment to all visitors.

In addition to defense product exhibitions, the holding of the Indo Defense 2018 Expo & Forum also held an international forum themed "Ensuring Regional Stability through Cooperation on Counter Terrorism" and Indo Marine 2018 forum themed "Ensuring Regional Stability Through Development of the National Maritime Capability and Maritime Security Cooperation", also the Indo Aerospace Business Forum with the theme "Sustainability of Civil Aviation in Indonesia".

The implementation of Indo



Defense 2018 Expo & Forum was fully supported by the Ministries / Government Institutions and related associations including the Ministry of Trade, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Education and Culture, Ministry of Research and Technology, Ministry of Industry, Ministry of Transportation, Ministry of Tourism, Marine and Fisheries Ministry Republic of Indonesia (KKP), TNI, Police, Republic of Indonesia Marine Security Agency (Bakamla), National Agency for Combating Terrorism (BNPT), University of Hang Tuah, Indonesian defense University (Unhan), ITB, Indonesian Drone Pilot Association, Indonesian Ship and Offshore Industry Company Association and Indonesia Aircraft Maintenance Services Association.

From November 7 to November 9, 2018, this exhibition was specifically for business and professional visitors. Whereas on the last day, on November

10, 2018, the exhibition opened to the public with online pre-registration or an entry fee.

The Vice President of the Republic of Indonesia Jusuf Kalla in the opening of defense industry exhibition "Indo Defense 2018 Expo & Forum" hoped that the holding of this exhibition will benefit to improve the progress and capabilities of the domestic defense industry. According to the Vice President, an effort to strive for the domestic defense industry was important in order to realize the independence of the defense equipment to meet the needs of the TNI.

The Indonesian Vice President further said, as in Indonesia's previous experience, Indonesia had experience in being sanctioned by embargo in the 90s, how difficult it was for Indonesia to obtain defense equipments because of the embargo. For this reason, Indonesia must always be

ready to be independent of its own capabilities, in addition to establishing cooperation with other countries.

The Vice President Jusuf Kalla expected the Indo Defense 2018 exhibition to be made to provide knowledge on the extent of technological advances in the future and present, as well as to know what is needed today. The capability of the defense industry and defense research of a country is also useful for the progress of society. As an example of progress in the field of the internet that starts from military research for military capabilities which then becomes something that is so useful for everyone today. Likewise, containers that initially began for the needs of war, then became an important part of the progress of trade in this world.

On the event of the opening of Indodefence 2018 exhibition, the Indonesian Defense Minister's





Ryamizard Ryacudu expressed the role of this exhibition, specifically opening and expanding markets for Indonesian defense industry products both as a whole product and as part of the global defense industry chain. The strategic goal is to promote national defense industry products and strengthen the collaboration of Indonesia's domestic defense industry with the country's defense industry, which in turn can support the realization of Indonesia's national defense industry independence.

Minister of Defense proudly said that one of the proofs of the success of the defense industry's progress was that one that was exhibited as the new products of the national defense industry, called the Medium Tank produced by PT. Pindad in collaboration with FNSS, Turkey. This Medium Tank is a form of Government's Full support for the nation's production. With the proof of an independent and advanced

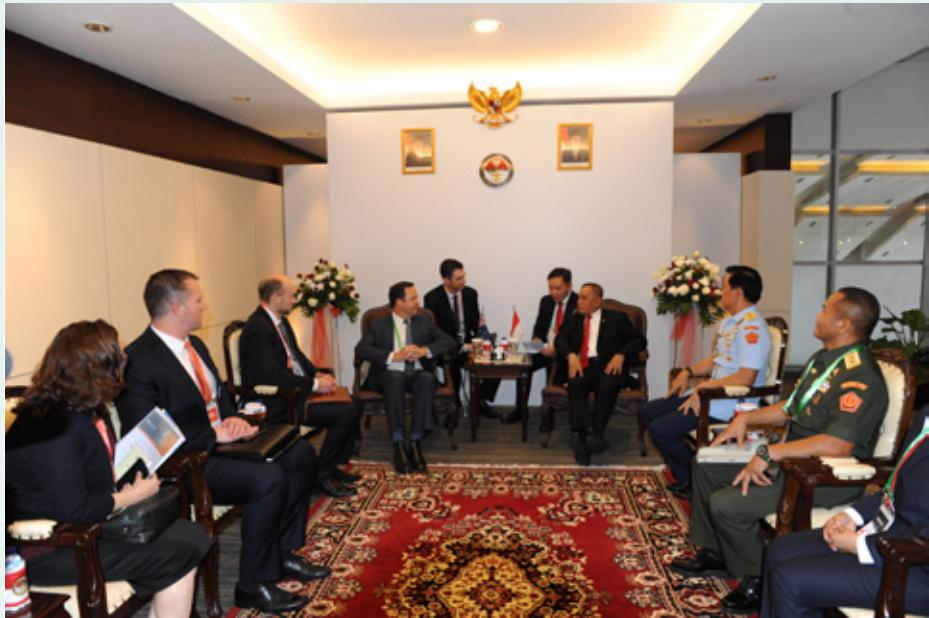
defense industry in the current era, it will certainly be able to help the process of growth and independence of the domestic economy in line with the President's *Nawa Cita* Vision.

According to Minister of Defense Ryamizard Ryacudu, Indonesia has been able to be independent and towards the process of becoming a defense equipment manufacturer that capable to take its part internationally. This is not an ambitious thing but a reality that must be realized together, because basically the Indonesian people have been destined to become a nation with great potential to innovate and develop industries based on advanced technology. Today's technological development is so rapid and full of nuances of global competition between nations, in turn, has an important meaning in determining the existence of a nation.

MoU Agreement at the Indo Defense 2018 Expo & Forum

The opportunity for the Indo Defense 2018 Expo & Forum exhibition is a good momentum for domestic defense industry companies to enhance and expand cooperation with various strategic domestic and foreign partners. In holding Indo Defense 2018, several Memorandums of Understanding (MOU) were signed including, the MoU between Pindad with Rohde Schwarz (Germany). The collaboration between the two defense industries is to establish cooperation in the area of maintenance and repairs for tactical R & S SDTR / M3TR radio, National Waveform Development and interoperability, local cryptology implementation for tactical radio networks and for vehicular radio tactical integration.

PT. Pindad with the CMI Defense



(CMID) industry, has also achieved a strengthening of strategic cooperation to increase the capability of Pindad as a CMID partner in manufacturing turret weapons systems with expert training and increasing local content of suppliers in Indonesia in order to make Pindad a supply of CMID HUB as well as the cooperation to advance export potential.

For the time being with the Korean Defense industry, the Indonesian government has also declared an agreement for some cooperation. The Indonesian Ministry of Defense through the Defense Facility Agency (*Baranahan*) of the Ministry of Defense signed a cooperation contract with Korea Aerospace Industries (KAI). This contract is a follow-up of the

relationship between the Indonesian Ministry of Defense, the Indonesian Air Force and KAI. For Korea, especially KAI, the Air Force is a very important customer. The signing of this contract supports and strengthens the TNI AU weapon equipment.

The Head of Defence Facility Agency (*Kabaranahan*) expressed his appreciation to the Korean side for the signing of this contract. Through these two contracts, *Kabaranahan* believes that KAI will prepare its best capability to support the Ministry of Defense and the Air Force.

The achievement of the signing of several MoUs is in line with the objectives and expectations of the exhibition as delivered by Defense Minister Ryamizard Ryacudu, namely the strengthening of Indonesia's domestic defense industry collaboration with the country's defense industry which in turn can support the realization of Indonesia's national defense industry.



The Meeting of National Defense Officials at the 2018 Indo Defence Session Expo & Forum.

The Indo Defence 2018 exhibition was also filled with a number of meetings with defense officials from friendly countries to discuss the potential for cooperation in the defense sector. One of them was after the opening ceremony, Minister of Defense of the Republic of Indonesia Ryamizard Ryacudu immediately received a visit from Senior Minister of State for Defense Singapore, SMS Heng Chee How. At this meeting, the Indonesian Government expressed the appreciation for Singapore's support for the joint statement on combating terrorism in ASEAN with the Our Eyes Initiative, as well as chemical, biological and radiological threats. Minister of Defense hopes that the cooperation and friendship relations between the two countries can continue to be maintained with a spirit of brotherhood and the principle of mutual respect, and will make a positive contribution, not only in the

interests of both countries, but also for the security, peace in the region and the world in the broad spectrum.

After receiving a visit, the Senior Minister of State for Defense Singapore Minister of Defense Republic of Indonesia received the visit of the Deputy Minister of Defense of Iran H.E. Brigadier General Ghasem Taghizadeh. In this meeting, Minister of Defense said that in defense cooperation, Indonesia was guided by three policy pillars, such as building mutual trust, building defense capacity, and encouraging the independence of the Indonesian defense industry.

Meanwhile, Secretary General of the Ministry of Defense (*Sekjen Kemhan*) Air Marshal TNI Hadiyan Sumitaatmadja, on November 8 received a courtesy call from the Secretary General of the Ministry of Defense of Malaysia Mr. Dato Halimi bin Abd. After meeting the Secretary General of the Ministry of Defense of Malaysia, Secretary General of the Ministry of Defense of the

Indonesian Military Ministry Hadiyan Sumitaatmadja also received a visit from the Ukrainian Director General of Ukroboronprom Mr PavloBukin and his entourage.

With the holding of a meeting of national defense officials at the Indo Defense Expo & Forum, it is hoped that the domestic defense industry can meet and establish cooperation with other countries' defense industries, so that they can improve their capabilities and provide defense industry users to choose the products that are most suitable for their needs.

Live Demonstration Appearance

The Indo Defense 2018 Expo & Forum exhibition also shows several demonstrations of the superiority of the new defense equipment produced by the domestic defense industry (PT Pindad). Starting from the Medium Tank, which was named "Tiger", the "Rhinoceros" Combat vehicle and other defense equipment made by PT Pindad competed to show the



technological sophistication of all types of terrain it faced.

The presence of Medium Tanks is a testament to the ability of the domestic defense industry to produce innovative high-tech products to support the independence of Defense equipment. Medium Tank is a long program in building the mastery of technology towards the independence of domestic defense equipment. Medium Tank is included in 7 government strategic development programs to improve BUMNIS's ability to compete with the foreign defense industry.

Besides the appearance of PT Pindad's defense equipment, there were also performances by the Combat Reconnaissance (Intai Tempur (Tontaipur) Platoon troops of the Army Strategic Command (Kostrad) who carried out direct demonstrations in Operation Search and Rescue (SAR) hostage taking

by a group of terrorists. Tontaipur presents a hostage rescue simulation using defense equipment made by domestic defense industries such as personnel transport vehicles, tactical vehicles and assault rifles made by PT PINDAD and communication equipment made by PT LEN. In this live demonstration, Tontaipur also includes trained animals.

Indo Defense this time was carried out safely and successfully. This was the result of the hard work of various parties. This success is the main capital to prepare for Indo Defense next 2 years.***



RECOGNIZING THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND DISRUPTIVE INNOVATION ON NATIONAL SECURITY THREATS

By:
Darma Agung, M.Sc (Han)
Indonesia, Prof. Dr. H.

Indonesian Defense University Alumni



“Victory will smile upon those who anticipate changes in the character of war, not upon those who wait to adapt themselves after changes occur.”

- Jenderal Giulio Douhet -

The Indonesian Defense White Paper (2015) states that there are 3 types of threats faced by Indonesia, namely military threats both armed and unarmed, non-military threats, and hybrid threats. The sources of threats can come from within and outside the country, and are carried out by state and non-state actors, which are national, regional and international. The impacts that arise include all aspects of social conditions consisting of ideology, politics, economics, socio-culture, defense and security.

It was also stated that the progress of science and technology influences the shape and pattern of war in the future. National defense certainly cannot be separated from technological aspects. The dynamics of technology can determine a war, or become a threat to state security. For this reason, it is imperative for defense policy makers to update information on the latest technological developments.

TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto at a press conference in

Jakarta (1/8) reminded that all high-ranking TNI officials to follow and respond to the development of the military world, especially those related to technology, doctrine, application, and increasingly complex spectrum of threats. The TNI Commander added, in facing the trend of new threats, the need for new operational patterns and new patterns of operation needed new doctrines.

Defense and security threats do not always arise from sophisticated weapons or modern armaments. The rapid development of digital information and technology, the

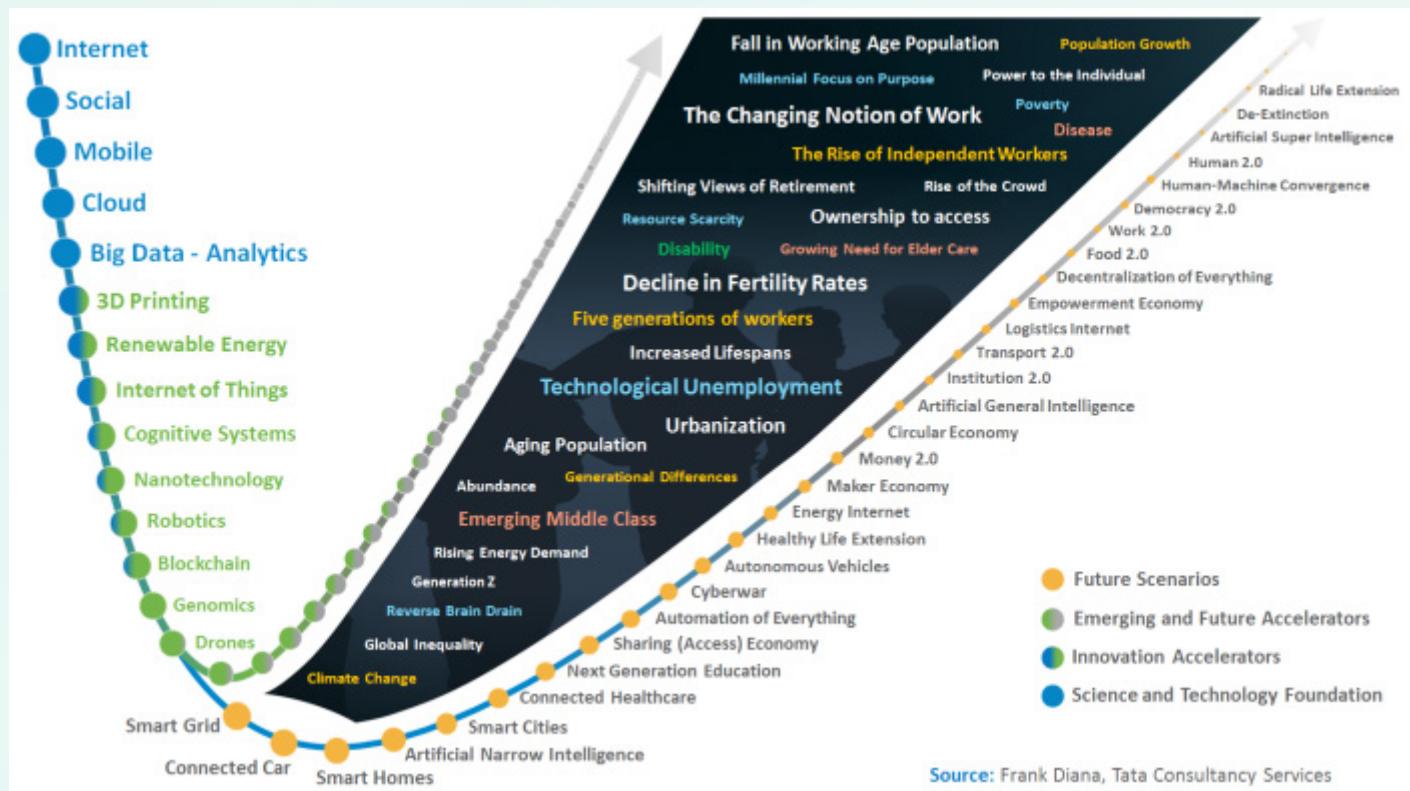
Disruptive Technology / Innovation

The term of disruptive technology was introduced in 1995 by Clayton M. Christensen and Joseph Bower to describe new technologies or innovations that made established technologies or innovations become obsolete in just a few years. Another definition of disruptive technology is the technology that, when it is introduced, it can change the markets, create new markets, or destroy the existing markets for other technologies.

John C. Keefe in his article, defines disruptive technology in the context

technologies / new innovations can develop into a national security threat. The threat of security from the development of these technologies raises new security dilemmas, challenges defense doctrines and regulations, and demands changes in defense strategies. Terry Pudas categorizes four security challenges from the emergence of disruptive technologies, called traditional, irregular, catastrophic, and naturally disruptive.

In the new technology cycle, there are several disruptive technologies, as in the following figure.



emergence of disruptive technologies and new innovations, have become "game-changers" that change the order and behavior of global security actors, and require countries to respond to these threats in ways that are different from conventional / traditional security threats and paradigms.

of military or defense security, as an innovation that forces advances in security to regulate current security related to changes in geopolitical, military, economic and social factors.

The history of war and international security cannot be separated from technological developments. Disruptive

Keefe mentioned several disruptive technologies including biotechnology, nanotechnology, and information technology. The World Economic Forum in 2015 predicted 8 new types of the new technology that could change the international security landscape, such as drones, autonomous weapons, wearable devices, additive

manufacturing, renewable energy, Nano technology, biological weapons, and bio-chemical weapons.

In the Indonesian context, there are several disruptive technologies / innovations used by the public, both commercial / non-commercial, and in certain conditions have the potential to pose a threat to national defense and security, such as: Social Media, Virtual Currency, Instant Messaging Applications (Encrypted Communication), Drone / UAS, Additive Manufacturing (3D printing), Artificial Intelligence, and etc.

a. Social media

Concepts such as 'unconventional', 'asymmetrical', 'irregular / irregular', 'hybrid', or 'new generation warfare' are often used in political and academic debates to describe the complexity

and characteristics of modern conflicts where state and non actors countries combine conventional methods with methods that lie outside our traditional understanding of military operations in their war strategy.

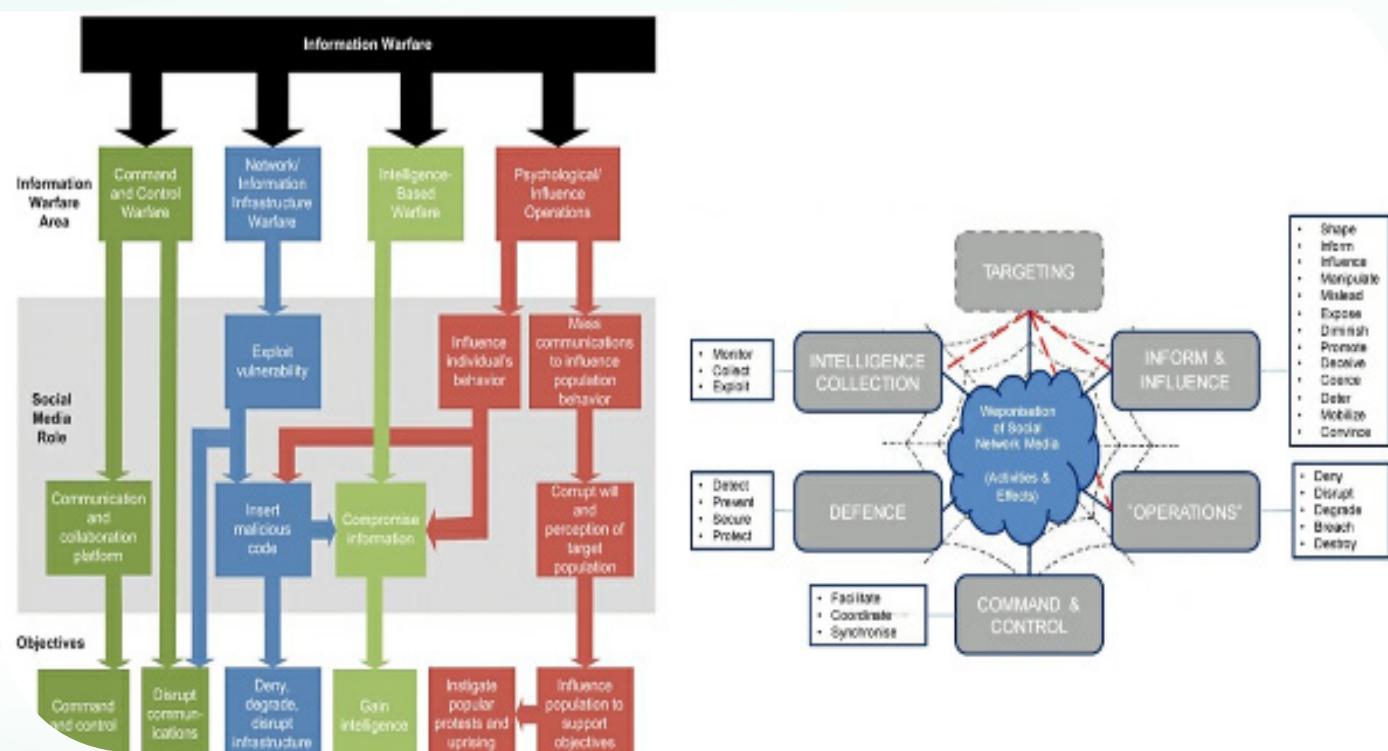
Hybrid warfare / hybrid warfare can be characterized as a form of warfare consisting of a mixture of various methods, both conventional and non-conventional, military and non-military, open and covert involving cyber warfare and information aimed at creating confusion and ambiguity in nature, provided and the purpose of this action, including the operation of information. Information effects can have an impact on the development of conflict, because the audience's perception of the outcome of the conflict is more important than the actual fact.

In the era of hybrid warfare, the use of social media as a tool in operations / conflict / information warfare is very important. Social media has the advantages of accessibility, speed, anonymity, high volume of information, no geographical limitations.

Thomas Nissen explained the role of social media in influencing the public, through activities carried out at 'peace time' before violence or hostility occurs, forming public, media and political discourse. Influence, in this context, is the systematic application of information and other means by state or non-state actors to secretly undermine or overthrow democratic governments or international organizations, intensify civil disputes in the interests of certain actors.

These activities are mostly aimed at weakening (shaping) the political,

Picture . Social Media as a Weapon in the Information War.



Source: B.V. Niekerk, M. Maharaj. (2013). Social Media and Information Conflict, International Journal of Communication, 7, hal. 1175; Nato Strategic Communications Centre of Excellence. (2016). Social Media As A Tool Of Hybrid Warfare, hal. 11.

economic, social, cultural, scientific, technological and military structures of a country to give the desired influence. This influence can be aimed at contextual changes or behavioural changes in society and in political discourse and subsequent decision making. Contextual change basically means the coup of the government which leads to regime change, which has the potential to lead to the formation of new alliances and a review of membership of international organizations and ratification of treaties, conventions, laws and international agreements. This change does not have to be violent, it can only be a question of influencing international elections or negotiations. Behaviour change will mean that the current government or regime remains in power, but significantly changes its policies in ways that support the strategic goals of actors.

The Guardian mentions the social media especially Facebook and Twitter have been used to manipulate information. Social media is used to promote lies, misinformation and propaganda by the government and individuals. The aim is to effect public opinion and perception.

The influence is generally intended to undermine the stability of a society primarily in times of peace, to create conditions that can cause change, either contextually or behaviour, which is caused by a combination of overt and covert activities. Often very emotional and controversial issues and topics are used, giving an overview of historical or current events that are generally known to the audience. Also included are several events regulated and proven by fictitious events, fake people (sometimes actors), non-existent academic sources, conspiracy theories and contradictions. All is done

to create the desired effect. This effect is often associated with uncertainty and distrust of existing formation (media and political elites) and fear for the future (mobilizing certain behaviours).

In the context of hybrid strategies or non-linear warfare, online and other forms of social media play a large role in efforts to influence people's perceptions of current events and topics. Most activities on social media in this context are deceptive, utilizing a direct and indirect approach to content creation and placement, among others, social engineering and trolling. Most methods, though, tend to be indirect, because it is difficult to distinguish between 'people' and 'personas' online, or between real and fake social media profiles. The latter is widely used for 'social engineering' through one person who operates several persons or through the use of bots. All of that aims to manipulate public discourse on, and through, social media.

b. Instant Messaging Application (Encrypted Communication)

Besides social media, digital technology platforms that are disruptive and can disrupt the stability of national defense security are instant messaging applications, such as WhatsApp, Telegram, etc.

In principle and technically, the potential for misuse of instant messaging applications is almost the same as social media. Information manipulation, dissemination of non-verified, uncontrolled and unattended information makes instant messaging applications as a national security threat.

Like social media, instant messaging applications have similar

advantages to others like the encrypted communication as well as the absence of supervision from the authorities of a country. WhatsApp allows users to send messages, links, images and videos to other users. Unlike Facebook, Twitter and Instagram, there is no algorithm that will determine which content is shown to users, there is no ability for outside companies to buy advertisements, and discussions occur in private groups.

Theoretically, this makes it more difficult to manipulate and there are few possibilities for major scandals like Cambridge Analytica. However, the use of "end-to-end" encryption means that no one - not even an application creator - can intercept and monitor messages between users. Even measuring how a story spreads on WhatsApp, which is owned by Facebook but is run as an independent business, is almost impossible.

Not only WhatsApp, the Telegram application is also used by terrorist networks to communicate with each other privately to avoid state surveillance. This service is then repeatedly used as a medium of communication and coordination of terrorist actors in launching their actions in various parts of the world. Telegrams, among others, were used to communicate by perpetrators of attacks in Paris in 2015, 2017 New Year's Eve attacks in Turkey, and attacks on St. Petersburg in April 2017. In Indonesia, a number of terrorism suspects who were arrested in December 2016 claimed to have learned to make bombs by following directions via Telegram.

The use of social media and instant messaging applications is very vulnerable to the spread of hoaxes and mobilization or communication



of terrorist networks. A number of countries in the world, such as India, Brazil, Kenya, including Indonesia, have expressed their concern about the role of instant messaging applications in spreading false news. TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto said the spread of hoaxes was the most serious threat (9/26). Hoaxes are a threat because they can go in any format, (because) the attack is the mind ".

c. Drone / UAS

The threat of drones against national defense and security is not new. The latest incident, in early August 2018, the threat of drones against national security took place in Venezuela when the attempted murder of President Nicolas Maduro used drones equipped with explosives. Nine days earlier,

Yemeni Houthi terrorist groups claimed to have sent armed drones to Abu Dhabi's international airport.

Previously, in 2011, 26-year-old Rezwan Ferdaus was arrested for planning an attack on the Pentagon and buildings in the US using remote controlled aircraft containing C-4 explosives. In 2013, German Chancellor Angela Merkel experienced a similar incident while attending an outdoor campaign and a small quadcopter landed on a platform next to Merkel. El Mehdi Semlali Fahti was arrested in 2014, for planning to attack a school and federal building using remote control aircraft equipped with improvised explosive devices. The following year in 2015, a drone fell on the White House grounds, while in Japan, a drone was found on the

roof of the office of Japanese Prime Minister Shinzo Abe in Tokyo. In 2017, The Presidential Security Force (Paspampres) once forced to land a drone that flew on the crossing of the National Monument (Monas).

In 2017, ISIS released a propaganda video using drones with bombs, and used them in wars in Syria and Iraq.

The occurrence of attacks using a drone device, should awaken security forces in various countries that utilization, proliferation and weaponization of new disruptive technologies can be a real threat.

The drone / UAS platform can be used by terrorist or criminal elements for several purposes. In conditions without modification, drones can



Source: Ben Watson. 2017. The Drones of ISIS. Defense One. <https://www.defenseone.com/technology/2017/01/drones-isis/134542/>

create public disturbances, disrupt air or airplane operations, collect information that can be used for illegal purposes, and are employed as kinetic weapons. As a means of transportation, a drone device can be used to smuggle illegal substances into restricted areas by passing traditional security measures. Drones can also be armed with various forms of weapons, ranging from non-lethal explosives, projectiles, improvisations, weapons of mass destruction, or even digital attacks.

Even some small hobby drones can be armed with about 3 kg of C4 plastic explosives or some fragmentation grenades, which can cause a lot of damage. And armed drones might

not come alone, they in a herd, at one point had 10 in the air, simultaneously carrying out the flight plan.

Not many are aware of the security risks presented by drone devices. Not limited to drones that have combat capabilities (UCAV) such as Predator, but also on commercial drones such as quadcopter and the like which are often sold freely on the market for the purposes of education, entertainment, and coverage.

With the proliferation of similar drones on the market, it will increase the risk of state security and public security. Brian Buntz mentions several security threats by drones, namely: threats in the air space, being a vehicle

/ tool for weapons, disrupting sports events, corporate espionage, drug smuggling, collisions with civil / military aircraft, attacks on energy network systems, difficulties in enforcing rules and drone-based hacking.

Wallace and Loffi categorize drone /UAS threats in the following 3 categories:

Klaas Jan de Kraker and Rob van de Wiel outlined several threat scenarios in military situations involving mini drones weighing less than 20kg. First, in a public event at the stadium, a terrorist can launch an armed drone from a nearby building and aim the machine gun at the audience. Panic will trigger chaos and trampled dead

victims. Second, the drone crosses bulletproof glass that protects a VIP (Very Important Person) and detonates a grenade. Third, the drones launch chemical weapons into a heavily guarded building complex. The device can be disabled, but chemical attacks have the potential to provoke fear and panic from the personnel. Fourth,

Marshal Hadi Tjahjanto stressed the ban on flying drones at the opening of the 2018 Asian Games at the Bung Karno Main Stadium (GBK). If you are still reckless, we have prepared a blockade.

"We do not want to risk the threat of drones targeting VVIP officials.

Similar anticipation needs to be carried out in activities that involve extra security to protect public security, state officials, and vital objects of the state.

d. Additive Manufacturing / AM (3D printing)

3D printing is one of the various processes by which material is joined or compacted under computer control to create three-dimensional objects. The emergence and development of additive manufacturing (AM) technology, better known as 3D printing, has the potential to be misused by irresponsible groups.

Johnson et al. Mentioned several potential security implications with the existence of AM, there are two fields that should be of particular concern to policy makers: (1) the proliferation of kinetic and non-kinetic weapons and (2) economic dislocation.

AM development will have profound security implications, including forming tactics and capabilities of state and non-state actors. The US military and defense industry has recognized the benefits offered by AM for information gathering on war and intelligence. At present many parties, both military and non-military are interested in exploiting this technology.

The RAND study states 3D printing technology can benefit the military,



Source: Wallace, R. J., & Loffi, J. M. (2015). Examining Unmanned Aerial System Threats & Defenses: A Conceptual Analysis. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 2(4), hal. 6.

a direct attack through the grenade was dropped on the fighter jets being parked, with the aim of reducing the attack capacity of the troops.

In the violation of the 2018 Asian Games in Jakarta, TNI Commander

TNI will (drive) drones, the first is mobile from 1-1.5 km (from GBK). If it is still released, we prepare the drone buster," Marshal Hadi said at a press conference at the JCC Media Center, Senayan, Jakarta, Saturday (08/18/2018).

violent extremists and even street criminals, who can produce their own weapons to use and sell. The emergence of weapons blueprints

that can be downloaded freely - even though the effectiveness and capabilities of weapons produced from 3D printing are still debated - this will enable people to avoid checks and open gaps to make their own firearms. With the development of this technology, and without proper control, violent perpetrators may be able to emulate more sophisticated weapons systems, print deadly drones, and even produce cheap jamming or bait devices that interfere with intelligence gathering.

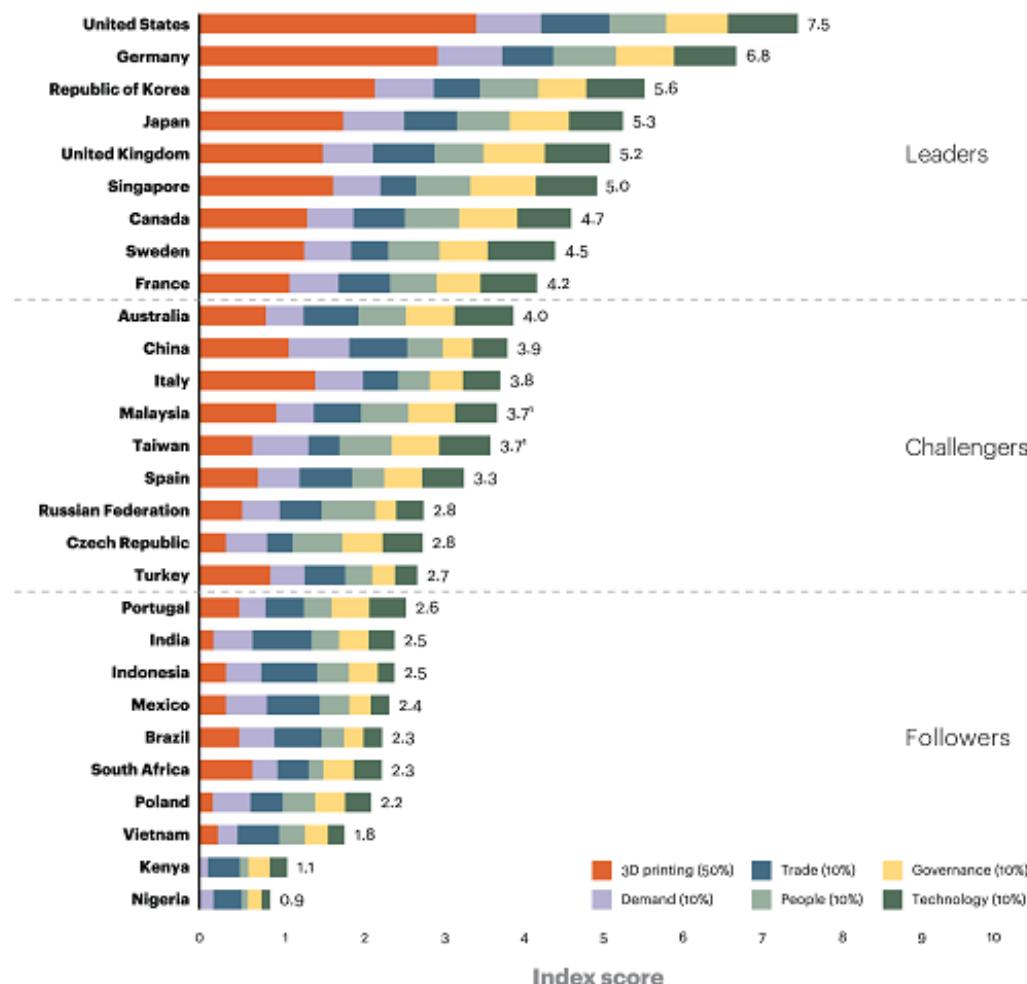
3D printing technology is also vulnerable to sabotage by hackers who can develop a tool to instruct 3D printers to introduce defective instructions or algorithms into very important aircraft parts.

The development and dissemination of AM can significantly accelerate the proliferation of weapons and have a dramatic effect on international conflict, violent extremism and even everyday crime. At the domestic level, point-of-sale consumption is no longer an opportunity for government control of risky items, such as firearms and drones. State sovereignty is based on a monopoly of power and, at least, the capacity to regulate weapons. AM will further relax this control, giving civilians greater access to lethal weapons and other violent tools. The state will face an increasing threat to public order

because everyone from protesters to members of criminal networks is able to produce weapons quickly. In a workshop, a former intelligence

the difficulties of these restrictions. In contrast, AM may indirectly support the survival and rise of countries such as North Korea, which no longer bear

The 3D Printing Index assesses each country on six dimensions



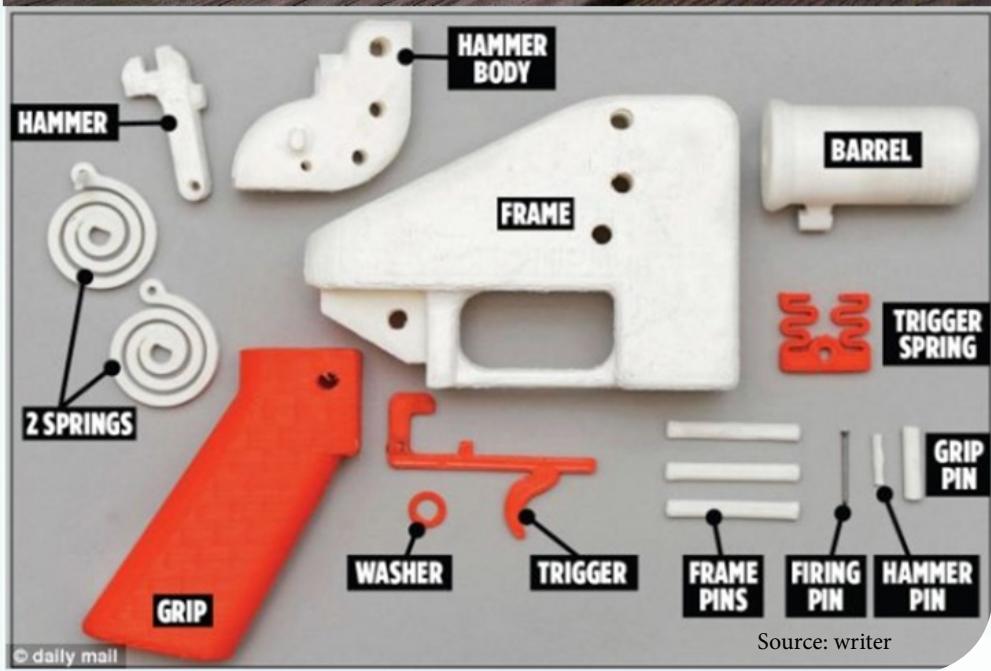
Source: Sean Monahan, Sam Brannen, Angela Kurdys, Rafael Angelo. (2017). 3D printing: Disrupting the \$12 Trillion Manufacturing Sector. AT Kearney. hal. 3.

analyst referred to the development of this potential as a "BYOWAPON" (Bring Your Own Weapon).

When AM proliferates, both export controls and sanctions can be far less effective. Sanctions that limit the transfer of technology and weapons can be very weak: with access to printers, raw materials, and designs, countries can more easily overcome

the same costs of resigning from the international community.

However, the AM threat goes far beyond this interstate dynamic. Extremist groups are the biggest security threat at the moment, and they will become more dangerous with AM proliferation. The spread of AM will have an impact on the difficulty of gun control. This worries policy makers that



the technology used to make jewellery can also be used to make parts for rifles or rocket engines.

Tracking the extraction group and their growth will become increasingly difficult. Meanwhile, assessments of threats and other security analyses often depend on information relating to the sale of weapons and the acquisition of other materials. If this extremist group is able to fulfil its weapons needs through AM instead, then it will be much more difficult to detect or disrupt their activities.

AM can increase the risk of mass murder. A wolf will be able to take advantage of the huge resources available online to print the weapons of his choice. AM will expand this collection of choices, make more exotic weapons (e.g., the bioterror delivery system) that are only accessible and increase the potential for deadly attacks.

Prevention of the threat of using AM will be more effective if it is focused on the control of the material used. By limiting the supply of rare or dangerous raw materials, regulators

can at least ensure that some destructive weapons do not become easily accessible.

e. Artificial Intelligence / Artificial Intelligence (Deepfake Video)

Deepfake, a combination of two words, deep and fake, which means literally "deep learning" and "fake", is a technique of human image synthesis based on artificial intelligence. This is used to combine and place existing images and videos into image or video sources.

Deepfake video is a way to manipulate audio and video from real people so that they do or say things they have never said or done. Technically, deepfake is digitally manipulated video - which, using existing recordings mixed with artificial intelligence and machine learning, can be made to look like, or close to, the real thing. In a hybrid war that uses everything, deepfake video technology has the potential to pose a threat to national security stability.

Deepfake has been used in various activities such as making fake porn videos, or revenge porn videos. In addition, Deepfake is also used for political sabotage through fake news and political hoaxes.

Fake news and videos made using Deepfake can then be amplified through social media and instant messaging in national political competitions. Deceptive films from officials who make statements that divide, act corruptly or behave badly can become familiar elements of political campaigns. In a society where



the level of technology and information literacy is low, this can increase the potential threat and intensity of the conflict.

In a similar context, intelligence agents might use deepfake to blackmail politicians, influence elections, spread propaganda, or exacerbate ethnic and religious tensions. Terrorist groups can also use it to spread propaganda in information warfare in the cyber world.

Conclusion

The emergence of new and disruptive technologies is undeniable to provide broad benefits to society. But on the other hand, there are potential uses that can threaten

national security. It's important to react to threats that appear in a timely manner.

The ability of the state to detect and anticipate threats from new technologies will determine the future of state security. The problem, regulations and legislation often fail to detect the emergence of an early threat to state defense and security, because technological developments are faster than the regulation itself. This then became a gap for groups that were not responsible and threatened national security.

In many cases, regulation becomes ineffective, on the other hand, there are difficulties in the law enforcement.

With a spectrum of increasingly complex threats, the concept of war that also changes, will require alertness and alertness of the state defense and security apparatus, new operational patterns and new doctrines. ***

STATE DEFENSE IN A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE: INTEGRATING SOCIAL CAPITAL IN THE EFFORT OF STATE DEFENSE WITHIN THE COMMUNITY LEVEL

By:

Bayu A. Yulianto, M.Si

Lecturer at the National Security Faculty of the Indonesian Defense University



As an important value in the life of the nation and state, the spirit of defending the country in which integrated values of patriotism and the love of citizens towards their country can be seen as an important capital for the development of the Indonesian nation in the future. Capital in the sense here is certainly not merely economic capital or physical capital, but more to social capital. It is said to be social capital, because the country's defending spirit is an order of values and norms inherent in the social structure of

Indonesian society; which in some ways has an important function to solve the problems faced by this nation.

On the other hands, there are many types of social capital actually live and develop within Indonesian society. Social capital is such that, in practice, it also has a large enough function to limit social problems in society. At a more operational level, social capital has such an opportunity to be integrated with

the concept of state defense; which is being promoted by the Ministry of Defense. The problem is, to what extent is the relation between the concept of defending the country and the conception of social capital? Then, what social capital can be an important modality in efforts to defend the country by society and the state? And the last question, what kind of social capital development strategy can be in line with the Ministry of Defense's efforts to push the defense agenda of the country?

Conception of State Defense

The constitutional basis of efforts to defend the state is nothing but the origin of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 27 paragraph 3, which reads "Every citizen has the right and obligation to participate in the defense of the state". This is confirmed again in Article 30 of the 1945 Constitution; which reads, "Every citizen has the right and obligation to participate in state defense and security efforts". In the Law on National Defense No. 3 of 2002, in Article 9 which states that "defending the country is the attitude and behavior of citizens who are inspired by their love for the NKRI based on Pancasila and the 1945 Constitution. From these rules, Setiono (2017) then outlines three basic questions about defending the country, namely: What must be defended from the state? Why should the country be defended? And, who must defend

the country. In his explanation, he stated that what must be defended from the state is its sovereignty, territorial integrity, and the safety of all nations from all forms of threats. Furthermore, the state must be defended because the state must survive and fight for its interests when naturally having to deal with the interests of other countries. While those who must defend the country are those who are included in the nation's components in the universal defense system, such as the TNI, state institutions, social institutions, political institutions, and all citizens.

Meanwhile, Zuhdi (2017) presents a historical perspective in looking at the determination of the State Defense Day (HBN) on December 19. According to him, HBN was set based on historical references related to the struggle of the Indonesian people in the face of Dutch colonists who wanted to

regain control of Indonesia through their second military aggression. By piggybacking on Allied forces, the Dutch sought to reclaim Indonesia, after Japan was defeated and driven out of Indonesia. According to him, this momentum shows how the TNI under the leadership of General Sudirman at that time continued to fight in the form of guerrilla warfare. The guerrilla resistance could continue because the TNI fought with the full support of the people who generally refused to cooperate with the Dutch. Here, the people's efforts to support the TNI struggle are a concrete representation of the spirit of defending the country in the past.

From this explanation, it is clear that defending the country as an order of value, lived and developed in the midst of society since Indonesia as a modern nation state stood erect on August 17, 1945. Community involvement in





helping the TNI fight against Dutch colonizers proved how the struggle was not only the domain of military groups, but also the people of Indonesia. If we look at the history of the Indonesian military itself, the emergence of people's resistance forces born from the womb of the people themselves, shows a spirit of defending the state that transcends formalistic problems in the military context. This once again confirms that the country's own spirit of defense also developed among the people of Indonesia. On this basis, the defense strategy, which is then used by the Indonesian state, is a universal defense strategy, where the people are also an important part of the country's efforts to defend its sovereignty and territory from the threat of the enemy.

Not only stop at the level of value, the enthusiasm for defending the country in such a way, in turn has

also been established as a national norm that binds all the people of Indonesia in the 1945 Constitution. Determination of values that live in Indonesian society into one binding norm shows that the state has arrived at a necessity, that without the people who are loyal to the republic and participate in efforts to defend their country, then the abstruse of this country can survive.

In its initial journey, the program to defend the country itself was emphasized more on the TNI's efforts as a major national component along with the reserve component and other supporting components to defend the country from enemy interference. But in its development state defense is not only in the domain of war, but also in non-war areas, including non-military. So that it takes an effort to interpret the country's defense more broadly and relatively flexibly.

Efforts to defend the country can also touch the daily practices of citizens in improving the quality and achievements of social life in their environment, such as maintaining cleanliness and environmental security; participate actively in efforts to raise the name of the nation in the international arena, both in the world of science, sports, and the arts; or contribute to humanitarian efforts, such as volunteering for disasters or becoming active blood donor participants. All kinds of efforts to improve progress in their environment can fall into the category of efforts to defend the country of a citizen.

Sociological Perspectives on Social Capital

The definition of social capital actually refers to the concept of social capital that is widely developed in Western countries. In

the tongue of Indonesians, social capital is then familiar with the term social capital. Robert Lawang (2005: 5) tries to project the absorption of the word social capital as social capital. Because according to him, the concept of social capital itself is attached to capitalism as a reference. While in the Indonesian language repertoire, capitalism itself is not in harmony with the notion of capitalism. This is where the problem is the absorption of social capital phrases into social capital. Even though it is widely used, there are still fundamental problems remaining related to the concept. Although the use of the phrase social capital can still be justified, Lawang suggests that we should use the phrase social capital so as not to reduce the original meaning of social capital.

According to Lawang (2005: 210), based on the various concepts of social capital proposed by scholars, social capital can be

interpreted as a social force of community which together with other capital, is tied to the social structure of micro, meso and macro, and serves to increase efficiency and effectiveness in overcoming problems.

In general, social capital can mean a social capacity which consists of a system of values, norms, trust and social networks that are tied to certain social institutions that can be used to solve social problems that occur in society, including improving the economy social communities. Social capital can also develop, if in a social structure where social capital is anchored, there are individuals who can play an important role in empowering social ties among members of the community. This is in social capital known as the bounding term social capital, which is more oriented into the community itself. On the other hands, there are different concepts, which are related to

how the community can network with communities or other entities within and is outside the area where they live. Optimization of social networking is sociologically also known as social capital bridging. This allows the social structure to be able to empower (enabling) members as well as the existing institutions in the community.

Since both have references to social values and norms, social capital clearly has a functional closeness with the concept of defending the state. If the relationship is so close, then the conception of social capital actually has a considerable opportunity to be integrated with the state defense concept developed by the Ministry of Defense.

Developing Social Capital in the context of State Defense

The integration of the forms of social capital that exist in the

Table 1. Key concepts of social capital

Author	Tethered to	Independent Variables	Dependent Variable
Coleman (1988)	Structure social: relationship social, institutional	Function hope, worthy of trust, channel, network, organization	liability, Actor's action or, actor in the body norms, sanctions, law
Putnam (1995)	Social institution	Network, the norm, trust	Success, economy, democracy
Fukuyama (1995)	Religion, philosophy	Trust, value	Cooperation, Success economy
Turner (2000)	Relationships social, organizational pattern, created individually	strength	Potency, development economy

Source: Lawang (2005: 210)



community on the agenda of the state defense organized by the Ministry of Defense, opens up the possibility to further strengthen the position of the community in the efforts of national defense and security.

The functional closeness between the concept of state defense and social capital opens up opportunities for greater integration. This can be seen from the main concepts of social capital such as the system of values and norms that are developed, social institutions that become the moorings of the intended social capital, and trust that grows in a social community that can be empowered when networking with groups. Other social In terms of defending the country, loving the country and being willing to sacrifice citizens to safeguard the country's sovereignty and territorial

integrity, not only are they at the level of values, but they have been formulated as national norms so that they bind social bonds when they need them or ask him to get involved. This clearly transcends the issue of consciousness, which is individual in nature, because as a social bond, it is absolutely fulfilled by all citizens mentioned in the regulation. This is the first and foremost point that can bridge the conception of social capital with the agenda of defending the country itself.

Departing from the importance of social values and norms in the context of defending the country, the agendas of defending the state should be harmonized with the efforts of the state to strengthen local institutions and institutions that live in the community. Because of the fact, there are many local institutions and institutions that

have a major contribution in solving social problems in the community, such as reducing social conflicts or increasing the income of local residents. In such a way, the concept of defending the state can also touch on issues at the local level that are relevant to efforts to advance one community. And defending the country, whose reference is to the perspective of defense and security, has a broader meaning, both socially and economically.

Next, if we look at developing social institutions in Indonesia, government institutions, mass organizations, political parties, and informal institutions in the community, we can find out that these institutions have an important role in the community. Referring to the perspective of social capital, the institution should have high trust from the community so that many social problems can be resolved by



optimizing the trust. However, not all state institutions receive high trust from the community. Some are even considered to be not optimal in helping solve social problems.

For example, based on a survey conducted by LSI Denny JA accessed from the Detiknews portal page (2018), data was obtained that the level of public trust in state institutions was quite diverse. From the start of the TNI, which received the highest trust (90.4%), then KPK (89%), Polri (87.8%), BPK (79.6%), and so on. While the DPRRI, which consists of members of political parties, only won 65% of trust (the lowest among all surveyed state institutions). In other words, the level of public trust in state institutions is very diverse. This means that community trust in state institutions can also be varied. There is considerable homework to be able to increase people's trust in all of the country's institutions, especially in relation to their efforts to solve social problems at the community level.

At this point, the homework in question can also be placed as a key agenda of the practice of

defending the state at the macro level, with efforts to improve the quality of public services by state institutions. Defending the country in this context clearly has a fairly strong political articulation, even though it is not in everyday political terms, but politics in the context of improving public services by state institutions to the public.

Defending the country can also integrate the values and norms that develop in society, which include what we know as the term local wisdom. Much local wisdom is part of the tradition and culture in the community that is functional towards the development of the community itself. In a broader scope, these values can even bring greater economic potential to the community through the development of a tourism agenda, as well as the development of small and medium enterprises. Local wisdom like this is a representation of social capital that develops in society. Therefore, the efforts of some people to continue to preserve local culture, in this case should be appreciated as a concrete work of defending the state at the community level.

On the basis of various explanations, the agenda of defending the country, which has social, economic and political dimensions can be framed in a wider scope. Therefore, the Ministry of Defense needs to make a strategy for implementing the concept of defending the state in broader construction based on social capital that lives and develops in a community. An agenda for defending the state that is intended for social communities that have a high love for the state and functional for the development of the community itself.***

Bibliography

Coleman, James, 1988, *Social Capital in the Creation of Human Capital*,

Dasgupta P. and Ismail Serageldin (ed), 2000, *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, hal 13-39.

Fukuyama Francis, 1995, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, NY Free Press.

Fukuyama Francis, 1995, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, NY Free Press

<https://news.detik.com/berita/4143291/lsi-denny-ja-tni-paling-dipercaya-publik-dpr-peringkat-terbawah>

Putnam, Robert, 1995, *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*, Journal of Democracy, 6:65-78.

Setiono, Kup Yanto, 2017, *State Defense in the National Defense Strategy and Policy Perspective*, 2017 Special Edition Wira, Ministry of Defense.

Zuhdi, Susanto, 2017, *State Defense in the Historical Perspective of the Indonesian Nation's Struggle*, 2017 Special Edition Wira, Ministry of Defense.

THE STATE DEFENSE PROGRAM ACHIEVEMENT

By:

Drs. Panca Mugi Priyatno, M.MHan

Senior Defense Analyst at Defence Potential Secretariat MINDEF



Introduction

Indonesia is a country which is Indonesia's national defense system is designed in accordance with the spectrum of challenged threats, defined as tangible and intangible threats. The intangible threat, is the threat of open war between countries which is unlikely to occur. Meanwhile, the tangible threat is the threat that is being experienced by the state itself such as terrorism and radicalism, separatism and armed rebellion,

natural and environmental disasters, border area violations, piracy and the stealing of Natural Resources, disease outbreaks, cyber warfare and intelligence as well as circulation and drugs abuse.

The increasingly complex spectrum of threats today makes continuous analysis including taking appropriate steps to deal with the threats. The President of the Republic of Indonesia in his remarks on the commemoration of the National Defense Day on

December 19, 2014 emphasized that the current challenges and threats to the nation's sovereignty are multidimensional in its nature. The threats develop into multidimensional because the character of the threat can be sourced from ideology, politics, economics, social and culture. Therefore, that requires us to redefine what is meant by State Defense.

State Defense has a very broad spectrum in various fields of life, ranging from political, economic,

social and cultural, which can be done by every citizen from various professional backgrounds; starting from farmers, laborers, professionals to traders, which can be realized in daily life according to the role and profession of citizens.

The Ministry of Defense has issued a National Defense Policy which in its policy direction is to support the development of national character through fostering awareness and ability to defend the country in order to develop values contained in the state defense and in the framework of supporting national development.

This paper reviews the Ministry of Defense's policies and strategies in managing the State Defense program, as well as the achievement of State defense program during the 4 years of Jokowi- JK administration.

Policy and Strategy for the State Defense Program

The objective of the National Defense Policy is the realization of increased awareness of defending the country through the State Defense Awareness Program (PKBN) to embody the citizens to love their homeland, have ethics, attitudes and manners, as well as have strong characters and personalities, which are carried out in an integrated manner, and synergize between the Ministry of Defense, Ministries / Institutions, Regional Governments, and other components of the nation. State defense activities are carried out continuously through socialization, education and training in residential, educational and employment environments to form a defense cadre of the state in order to support the national defense system.

Regarding the State Defense policy, the Ministry of Defense has drafted regulations on State Defense, in Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia

No: 32 of 2016, on September 6, 2016 about the Guidelines for State Defense Awareness Development (PKBN). This regulation is an operational legal umbrella for PKBN activities. Therefore, in forming a formidable universal defense system, it is necessary to hold a State Defense Awareness Development for all Indonesian citizens. The Development of State Defense Awareness is one of the most important efforts in building deterrent power, in order to strengthen the defense of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) from the threat and disruption of state sovereignty, the territorial integrity of the country, and the safety of all nations.

Basically, the National Defense Awareness Development is intended to build and shape the mental attitude and character of every Indonesian citizen to have a sense of love for the country as and the awareness of the nation and state, be loyal to



the Pancasila as a state ideology, be willing to sacrifice for the nation and state, and have fundamental capacity of State Defense, both physically and mentally.

In addition to the preparation of the regulations mentioned above, the PKBN Master Design has also been compiled. This statement contains the direction of the national PKBN implementation policy for the period of 2015-2040. Whereas the PKBN Road Map is a form of operationalization of the PKBN Master Design which is prepared and stipulated every 5 (five) years, and is a detailed plan for implementing the PKBN from stage to stage for five years with clear annual targets. The 2015-2040 PKBN Master Design will be stipulated by a Presidential Regulation, while the PKBN Road Map, is a living document, where in its development can be dynamic in reference to the development of regulations, policies and flexible.

The targets for the first five years are focused on the PKBN Management Arrangement which consists of the PKBN system, establishment, maintenance of deployment and National Defense Cadre Infrastructure Facilities by Ministries / Institutions and Regional Governments, with reference to the 2015-2019 RPJMN, are as follows:

- The Establishment of understanding between Ministries / Institutions, Regional Governments, TNI and The National Police (Polri) and other components of the nation in the implementation of PKBN, in shaping the character of the nation.
- The Compilation of software as a guideline for implementing PKBN for Ministries/Institutions, Regional Governments, TNI and Polri
- The Compilation of

comprehensive implementation of PKBN curriculum, modules and materials.

- The Realization of standards, norms, criteria and procedures in the implementation of PKBN.
- The establishment of a national PKBN information and communication system.
- The Implementation of PKBN in the education and training institutions of each Ministry / Institution in accordance with their duties and functions
- The Implementation of PKBN in an integrated manner and synergy between Ministries / Institutions and all stakeholders.
- The establishment of State Defense cadres who have the awareness and capability of the State Defense for national defense.





- The Establishment of a National Defense Cadre as a Ministry / Institution Cadre in empowering National Awareness, National Resilience and National Defense Institutions
- The Availability of supporting facilities and infrastructure in each Ministry / Institution, Regional Government, TNI, Polri and other Stakeholders.
- The Allocated budgets by each Ministry / Institution and Regional Government and all stakeholders
- The Achievement of State Defense Cadre as much as 40% of the total population.

The target for the second five years is focused on the Strengthening PKBN Management, capability and awareness of the State Defense Cadres combined with the functions of Ministries / Institution in preparing conditions for National vigilance, Emergency Response and National

Defense, with reference to the RPJMN 2020-2024.

The target for the third five years is focused on the Stabilization PKBN Management and the National Defense Cadre institutions in Ministries / Institutions and Regional Governments and community institutions to increase the capacity of cadre involvement for National vigilance, Emergency Response and National Defense with reference to RPJPN 2025-2045 and RPJMN (2025 -2029).

The target for the fourth five years is focused on the Development PKBN Management, capability and quality of State Defense Awareness for all Indonesian citizens for National vigilance, Emergency Response and National Defense with reference to RPJPN 2025-2045 and RPJMN (2030-2034).

The target for the fifth five years is focused on the Actualization of the implementation of PKBN Nationwide in ensuring the realization of

Indonesian citizens who possess the ability and continuous awareness of national defense from generation to generation for national vigilance, emergency response and national defense, with reference to RPJPN 2025-2045 and RPJMN (2035-2040).

The Development of State Defense Awareness for all Indonesian citizens is needed a Development system called State Defense Awareness Development. In that process other than intended to debrief the values of national defense, national insight and insight into the archipelago in forming the character of the nation defending the country to understand national vigilance and national resilience which ultimately created a formidable state defense that was universal. Thus, it can be said that the Development of State Defense Awareness is a Subsystem of the implementation of national defense.

In the current context, the Implementation of PKBN has been carried out by several Ministries and Institutions that are partial, certain and



Suorce: pusdatin.rri.co.id

not comprehensive in accordance with their respective duties and functions. Therefore, the implementation of PKBN is expected to be executed in an integrated, united and comprehensive manner.

Efforts to create a unification of steps between Ministries, Government Agencies, Regional Governments, and other components of the nation, namely by building integrated systems that include elements of policy tools, PKBN human resources, building PKBN infrastructure, and preparing guidance and learning facilities and institutions.

Achivement

Increasing the awareness of the State Defense and the preparation of reliable and professional national resources in order to create the ability of the state and the nation to deter any multi-dimensional threats is one of the tasks of the Directorate General of Defense Potential.

- a. Some State Defence regulation products are:
- 1) Secretary General of the Ministry of Defense Regulation No: 11 of 2014, December 31, 2014. concerning State Defence Brevet
- 2) Decree of Minister of Defense Number: Kep / 1185 / M / XI / 2015. November 30, 2015. About PKBN Implementation Book for Indonesian Citizens in LN.
- 3) Decree of Minister of Defense Number: Kep / 1184 / XI / 2015 dated 30 November 2015. concerning PKBN Material for High School / Vocational / MA Teachers.
- 4) Decree of Minister of Defense Number: Kep / 1183 / XI / 2015 dated 30 November 2015. concerning PKBN Material for Junior High School / MTs Teachers.
- 5) Decree of Minister of Defense Number: Kep / 1182 / XI / 2015 dated 30 November 2015. concerning PKBN Measurement.
- 6) Decree of Minister of Defense Number: Kep / 1181 / XI / 2015 dated 30 November 2015. regarding the Implementation of PKBN.
- 7) Ministerial Regulation No: 32 of 2016, September 6, 2016. regarding PKBN Guidelines.
- 8) Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia No: 5 of 2017, June 14, 2017. About Uniform Clothing, Attributes and Completeness of State Defense Cadres.

b. Target program activities

- 1) Development of State Defense Awareness for all levels of society.
- 2) Focus Group Discussion (FGD), Seminars and Technical Guidance.
- 3) Activities through the National Defense Forum.
- 4) Exposure to various Educational Institutions.
- 5) International Conference.
- 6) State Defense Day Ceremony.
- 7) State Defence Sailing Service.
- 8) Enlightenment to Assisted Citizens and Penitentiary Staff.

c. State Defense Socialization Products

- 1) Electronic Media; through TV and Radio.
- 2) Print Media; Newspapers and Magazines
- 3) Social Media; Facebook, Instagram and Twitter.
- 4) Outdoor Media; Videotron, Stickers on buses.

Up to 2018, the total accumulation of State Defense cadres in the country have reached 83.4 million people carried out by the Ministry of Defense, other Ministries / Institutions, Universities, Regional Governments, TNI and Police. Targeting 34 provinces and several regencies / cities and the border areas of Papua, East

Nusa Tenggara and Kalimantan. The dissemination of State Defense is also carried out through social media content. We realize that the present era is the digital era. The number of followers in Twitter is 811 followers, Instagram 11,000 and Facebook 15,071.

Seteru is a teenage action film released in 2017, written by Bagus Bramanti and directed by Hanung Bramantyo. This film is a new strategy of the National Defense Directorate, Directorate General of Defense, Ministry of Defense in disseminating the love of the country and the spirit of defending the country, especially for young people. There was also Nationality Concert on defence of Indonesia. The concert featured various artistic creations to foster the spirit of nationalism in the younger generation



Source: pusdatin.rri.co.id



Source: beritacitra.com



Source: pusdatin.rri.co.id

Conclusions and Recommendations

Development of State Defense Awareness for all citizens is the formation of national character in various fields of life that can be realized in everyday life according to the role and profession of citizens to love the homeland. The Consciousness of the State embodies national

vigilance and national security, creating a formidable state defense that is universal. Therefore, the implementation of PKBN is expected to be implemented in an integrated, united and comprehensive manner.

In order to create a massive State Defense Awareness, Ministries / Agencies and Local Governments as

well as community institutions and other national components build integrated systems that include elements of policy tools, human resources, infrastructure, and prepare guidance and learning facilities and institutions for fostering awareness Defend the Country. ***



Source: pusdatin.rri.co.id



Source: earthkaleidoscope.blogspot.com

ARE WE READY TO FACE THE NATURAL DISASTERS?

By:

Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han)

Deputy Director of Jakarta Institute of the Arts



Source: fin.co.id

Preliminary

Indonesia is a country full of blessings. Its land, which is only 1.3% of the world's land area, is so rich in biodiversity, even the second richest in the world after Brazil for terrestrial biodiversity and number one for marine biodiversity. On the other hand, have we ever thought, that such a thing is also a result of the dynamic nature of Indonesia which is located in the ring of fire in the world?

The Pacific Ring of Fire whose existence forms part of the Indonesian archipelago is the

most active earthquake pathway in the world. Land movements whether landslides or liquefaction, earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, floods, are all natural phenomena that are often unpredictable or avoided. However, with the use of appropriate technology, vigilance can be increased to reduce disaster risk to the least possible extent.

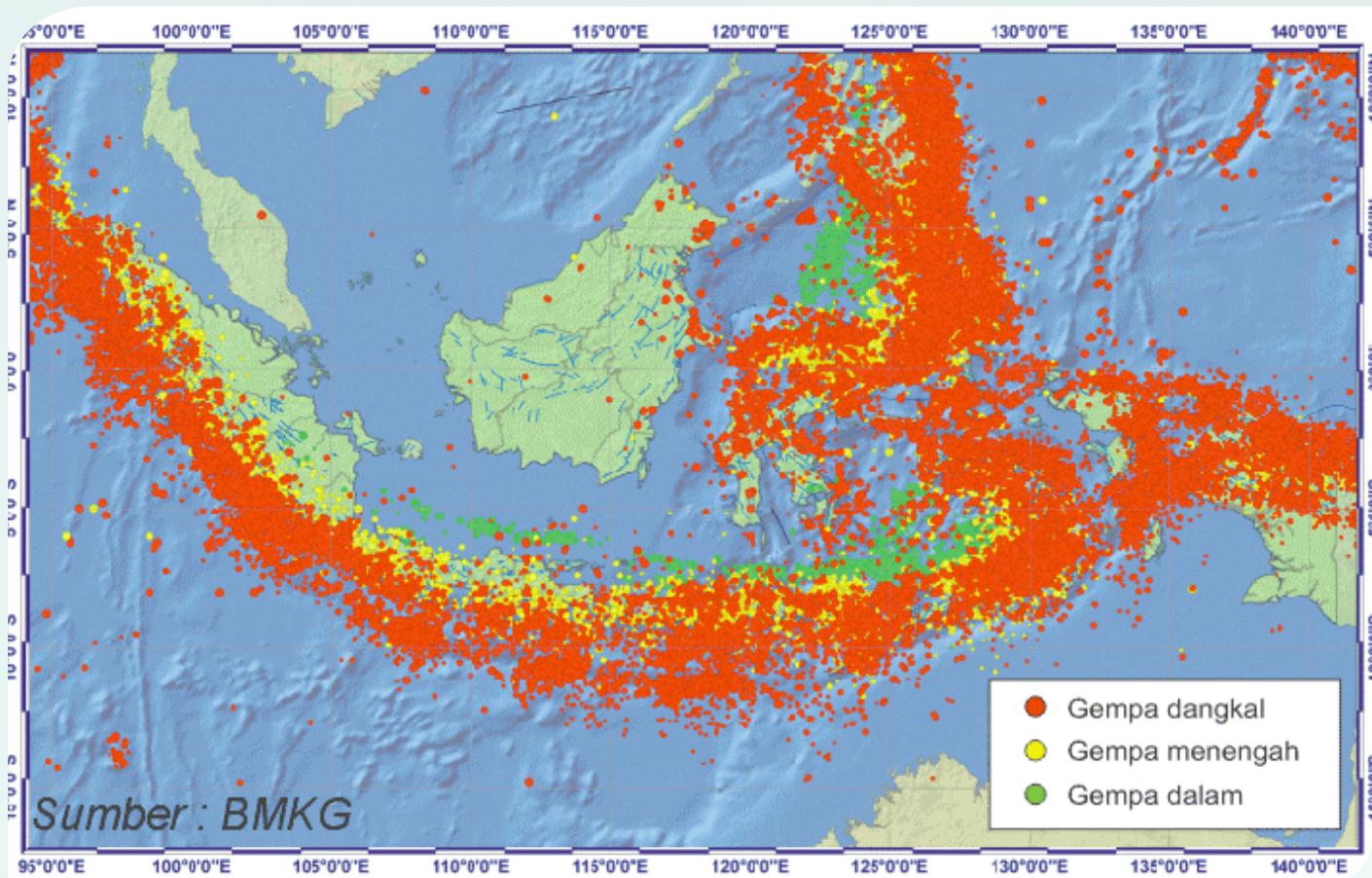
The short-term effects of a natural phenomenon that is considered a disaster may look so damaging. However, the natural phenomena that have occurred hundreds of years cannot be denied

are the source of Indonesia's rich biodiversity along with a variety of endemic species, high levels of soil fertility, and natural beauty that is typical of Indonesia.

Personal Preparedness for Disasters

Personal readiness in dealing with crisis situations or disasters is crucial to minimize casualties. Understanding of disasters, including evacuation and the existence of a disaster evacuation room is absolutely necessary. Preparedness education in the face of disasters, especially earthquakes,

Gambar 1. Peta Kegempaan (Seismisitas) di Indonesia Periode 1973-2010



Source : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2018

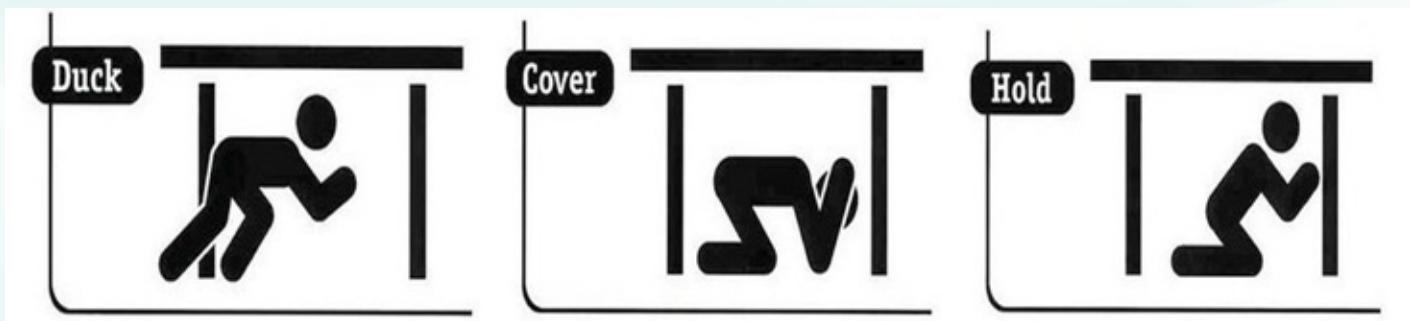
is very important starting early, whether at home or at school. As a country crossed by volcanology belts (See Figure 1), earthquakes in Indonesia often occur with an average of 450 earthquakes per year with a magnitude equal to or more than 4.00 on the Richter scale. Therefore, each individual understands at least the Duck-Cover-Hold self-rescue technique

(See Figure 2), which is still considered a personal response to the most effective earthquakes so far. In addition, understanding of the evacuation route and to immediately stay away from the sea if there is a potential tsunami still needs to be echoed.

This personal readiness is especially needed when residing

or doing activities in areas that are potentially prone to disaster. Data on disaster-prone areas with information updated regularly can be found on the site magma.vsi.esdm.go.id. By knowing the level of vulnerability of the disaster, at least the level of vigilance can be further enhanced by for example always preparing food stocks and emergency equipment that may

Gambar 2. Drop-Duck-Cover



Source : ksl.com

be needed during an emergency. These habits need to be a culture of people living in disaster-prone areas, including in building residential houses or other buildings.

In a number of disasters that occurred in Indonesia, most of the casualties occurred because the construction of existing buildings was not earthquake resistant. Guidance on earthquake resistant buildings has also been given, and the fulfillment of these provisions is the responsibility of the individuals who build them considering the level of supervision of buildings is very limited.

Social Resilience during the Disaster

As happened in Japan, the success of reducing the occurrence of victims is inseparable from the construction of earthquake-resistant buildings that exist. Therefore, in every building construction, safety, health, safety and sustainable

construction standards need to be considered especially if the building is in a geographic condition that is prone to earthquakes so that the comfort of the environment can still be built.

In addition, social security in the face of disasters cannot be separated from the existence of a disaster evacuation room. As part of the plan for supplying and utilizing regional infrastructure and facilities in urban spatial planning, the existence of disaster evacuation rooms can significantly reduce the impact of disasters. In this case, the cooperation of all components of the community in spatial planning and construction is also important. For example, the use of residential buildings where the ground floor area should not be used as a residential area, a strong building roof so that it can be used as a rescue and evacuation area for residential areas below, public and social facilities that can be a protection area and rescue local residents, space open

as an evaluation area and disaster protection area, as well as the use of natural evidence converted as a rescue area for the surrounding environment such as what is known as the Green Area.

To realize social security, inclusive development is also needed so that the community can be involved. Here, the public sector and the private sector are very important to immediately restore the situation. However, collectively depressed situations can lead to a period of social crisis to watch out for. This can occur if such severe conditions occur suddenly and cause disruption to the normal structural arrangement in the social system of the community. In such conditions, social control in the community can be lost, and then result in the loss of values and norms that exist in society. To deal with this possibility, social security needs to be built to become a community capital that is strong enough to deal with various social shocks



Table 1. A paradigm shift in disaster management

PAST	NOW
Centralized	Decentralized
Emergency Response, Rehabilitation, Reconstruction	Prevention, Mitigation, Preparedness
Impact Management	Risk Management
Resistant to the Single Sector	Multi sector Responsibilities
Single Hazard Approach	Multi hazard approach
Government Sector	Community and Private Sector

resulting from disasters. Formation of social capital, whether Bonding (ties between members of social groups), Bridging (ties between social groups), Linking (ties with higher social groups or authorities) so that strong social relations occur, can lead to a level of social trust that is not easily faltered. Here, support for social resilience arises with crisis information systems, humanitarian assistance, and a variety of collective actions so that people are quickly able to return from adversity due to disasters.

State Defense in a Country Full of Disasters

As a disaster-prone area, Indonesia has mandated the importance of disaster mitigation-based spatial planning in the context of disaster risk reduction efforts, as the world agreement in the Hyogo Framework, which has also been stated in Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. Vulnerabilities that exist as a result of living in disaster-prone areas make people who live in this area also need to be reconciled with existing natural conditions and have their own resilience related to possible

limitations in land use so that they are able to recover immediately in the event of a disaster situation.

Therefore, it is very important for all stakeholders to realize the importance of spatial planning based on natural disaster mitigation as an effort to improve the safety and comfort of the lives and livelihoods of its people, so that disaster-prone areas should be part of protected areas, and in spatial planning, in addition to potential sources natural resources, human resources, and artificial resources, it is also necessary to pay attention to the physical condition of Indonesia which is vulnerable to disasters. This is coupled with the willingness of disaster evacuation rooms to be part of the plan to supply and utilize regional infrastructure and facilities that must be considered in urban spatial planning because the provision of disaster evacuation spaces is intended to reduce the impact caused by disasters.

The need to prepare data and information about disaster is part of sustainable community development. In this case, it needs the existence of

community empowerment, close community relations, inter-group connections, interdependence, good communication, constructive dialogue, but also social capital that guarantees it all. The lack of preparedness and unpreparedness of the regional leaders became the spotlight regarding the slow pace of disaster management.

With regard to preparedness for disasters, the crucial thing in each region in Indonesia is the prevailing spatial planning. According to existing provisions, spatial planning is needed in the context of efforts to preserve and rehabilitate including reforestation of highland areas and river areas based on watershed systems (DAS) - to provide protection to the areas below (protected forests, water catchment areas, karst areas, etc.) and local protection (river areas, borders of rivers, reservoirs, swamps, fault lines, mining areas, etc.); repair and maintain urban drainage systems; and preparing evacuation routes, evacuation sites and aid routes. Supervision of spatial planning is a shared responsibility of the community in each region. This is the development of the Sendai



Framework with a paradigm shift in disaster management, as shown in Table 1, where disaster management is a shared responsibility of all regions and countries and sharing information about disasters and shoulder to shoulder in the face of existing disasters along with possible impacts.

In order to defend the country as well, considering the impact of a disaster event is also borne by all citizens, it is also necessary to map the area related to the potential for disasters and existing social capital comprehensively. Making a Zone Map related to the potential for disasters is intended as a mitigation effort that is integrated with the District and City Spatial Planning. In this case, the preparation of the Spatial Detail Plan (RDTR) and the Zoning Regulations as control of spatial use, in its implementation and supervision need to be monitored not only from the government and the community as the implementation of real state

defense efforts. Data collection on social capital in each region is considered necessary, considering that this is very important to keep the condition of the country stable and remain resilient even in times of disaster. The existence of social mapping can also be the starting point for handling the necessary assistance so that the response from the central government or other regions can be provided quickly and effectively.

Conclusion

To answer the question "Are we ready to face natural disasters?" A check is needed and then re-checks the strengthening of capacity in disaster management. Strengthening this capacity is not only from the government merely by improving facilities, infrastructure and institutions, but also requires public awareness which also determines disaster risk management.

The existing paradigm shift in disaster emphasizes the important role of the community and the private sector as well as coordination between institutions. Particularly in Indonesia, the main thing that is of concern is given the large number of casualties and property, including the highly felt environmental impact of the existence of management policies and / or disaster management and spatial planning to be able to implement and maintain a system that is efficient, effective and coordinated to manage disasters in order to minimize losses, the number of victims or disturbances caused. This kind of activity cannot occur in a short time, but must be sustainable, requires a lot of costs and energy, but all that needs to be done to ensure a good life in a country full of potential disasters.***

INDO DEFENCE 2018 EXPO & FORUM

INCORPORATING WITH

INDO MARINE
EXPO & FORUM
2018

and

INDO AEROSPACE
EXPO & FORUM
2018

Hosted by
The Ministry of Defense
of the Republic of Indonesia

